

**PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG BERSUMBER DARI
ADD DI DESA MOOTILANGO KECAMATAN DUHIADAA
KABUPATEN POHUWATO**

OLEH

DIANITA INDRA SUKMA DJAKATARA

NIM : S.2116169

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Jurusan
Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo**



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2020**

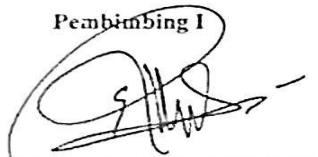
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

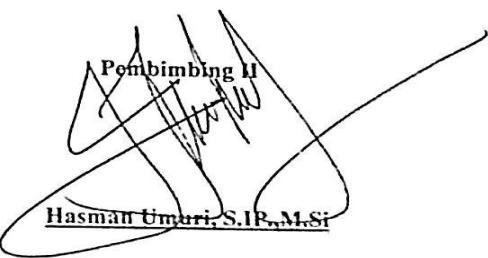
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG BERSUMBER
DARI ADD DI DESA MOOTILANGO KECAMATAN DUHIADAA
KABUPATEN POHUWATO

OLEH

DIANITA INDRA SUKMA DJAKATARA
NIM : S.2116169

Skripsi ini telah memenuhi syarat dan disetujui oleh Tim Pembimbing
Pada tanggal.....18.....Maret.....2020

Pembimbing I

DR. Gretty Sy. Saleh, S.I.P., M.Si

Pembimbing II

Hasman Umuri, S.I.P., M.Si

HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN KEPALA DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA YANG BERSUMBER DARI ADD DI DESA MOOTILANGO KECAMATAN DUHIADAA KABUPATEN POHUWATO

OLEH

DIANITA INDRA SUKMA BIAKATARA

NIM : S.2116109

Terlah menerima surat dan Dipertahankan Pada Komisi Penguji Ujian Akhir
Tanggal Maret 2020

KOMISI PENGUJI

1. Edy Sijaya, S.I.P, M.Si
2. Iskandar Ibrahim, S.I.P, M.Si
3. Dr. Gretty Syatriani Saleh, S.I.P, M.Si
4. Drs. Noor Asief, M.Si
5. Hasman Umuri, S.I.P, M.Si

MENGETAHUI,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Dan Ilmu Politik
Universitas Ichsan Gorontalo



DR. ARMAN, S.Sos, M.Si
NIDN : 0913.0786.02

Ketua Program Studi
Ilmu Pemerintahan

Darmawaty Abdul Razak,
NIDN : 0924.0767.01

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya Tulis saya (Skripsi) ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya Tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dengan disebutkan nama dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena Karya Tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Marisa, 16 Maret 2020



ABSTRAK

Dianita Indra Sukma Djakatara : S.2116169, 2020, Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Yang Bersumber dari ADD, (Studi Kasus Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupatehn Pohuwato).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan berupa gaya kepemimpinan gaya kepemimpinan otoriter (X₁), gaya kepemimpinan partisipatif (X₂), dan gaya kepemimpinan delegatif (X₃) *Secara Simultan* maupun secara *parsial* terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari ADD, studi kasus di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupatehn Pohuwato.

Metode dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka-angka dan kata-kata atau kalimat dan gambar dengan memakai sampel dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok. Populasi dalam penelitian ini adalah terdiri dari Aparat desa, BPD, Kepala-kepala dusun, dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Mootilango. Sedangkan metode yang digunakan dalam penarikan sample dalam penelitian ini adalah Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan yang di tentukan peneliti bahwa populasi tersebut di anggap mampu dan mengetahui secara persis mengenai pokok permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukan Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Gaya Kepemimpinan Otoriter (X₁) terhadap Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari ADD di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, hal ini menunjukkan bahwa variabel Gaya Otoriter (X₁) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,193, dan nilai probailitas sebesar 0,054 yang berarti Gaya Otoriter mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari AD (Y) sebesar 19.3%.

Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Gaya Kepemimpinan Partisipatif (X₂) terhadap Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari ADD di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, hal ini menunjukkan bahwa variabel Gaya Partisipatif (X₂) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,262, dan nilai probailitas sebesar 0,003 yang berarti Gaya Partisipatif mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari AD (Y) sebesar 26.2%.

Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Gaya Kepemimpinan Delegatif (X₃) terhadap Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari ADD di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, hal ini menunjukkan bahwa variabel Gaya Delegatif (X₃) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,163, dan nilai probailitas sebesar 0,013 yang berarti Gaya Delegatif mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari AD (Y) sebesar 16.3%.

Kata Kunci : Gaya Kepemimpinan, Alokasi Dana Desa

MOTTO DAN PERSEMPAHAN

MOTTO

“Keyakinan merupakan jalan menuju kesuksesan karena keyakinan adalah wujud nyata dari segenap doa dan harapan yang dapat mendorong kita ke puncak kesuksesan. tanpa ragu melewati semua rintangan”

(DIANITA)



PERSEMPAHAN

Puji syukur kepada allah SWT . Kupersembahkan sebuah hasil dari usahaku . dan ku ucapkan terimakasih kepada seluruh keluarga kecilku yang selalu menjadi sebuah suntikan semangatku yang tak pernah henti mendoakan kesuksesan ku. terimakasih untuk ayahku sukri djakatara, ibuku mastin alim dan yang paling istimewa terimakasi suami tercinta yang selalu memberikan seluruh dukungan dan doa untukku untuk itu ku ucapakan banyak terimakasi untuk kalian para penyemangatku .. terimakasih.

**ALMAMATERKU TERCINTA
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
TEMPAT AKU MENIMBA ILMU**
KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena dengan berkah dan limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul **“Pengaruh Pengawasan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PDAM Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato”**. Dalam format yang sederhana, penulis menyusun Skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo.

Banyak hambatan dan tantangan yang dilalui dalam penulisan Skripsi ini, namun berkat ketekunan, semuanya dapat tertatasi dan olehnya, dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Bapak Muh. Ichsan Gaffar, M.Ak selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
2. Bapak DR. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
3. Bapak Dr. Arman, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak Marten Nusi, S.I.P.,M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Ichsan Gorontalo.

5. Ibu DR. Gretty Syatriani Saleh, S.IP, M.Si dan Bapak Hasman Umuri, S.IP, M.Si selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, yang selalu membimbing dan memberikan arahan dalam penyusunan proposal penelitian sampai dengan Skripsi.
6. Seluruh staf dosen dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
7. Rekan-rekan seangkatan Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo
8. Teristimewa Suami tercinta dan anak tersayang yang selalu sabar mendoakan dan memberikan bantuan moril maupun materil yang tak terhingga bagi kesuksesan penulis

Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian karya tulis ini.

Gorontalo,..... 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

HALAMAN PERNYATAANi

ABSTRAKii

MOTTO DAN PERSEMBAHANiii

KATA PENGANTARiv

DAFTAR ISIvi

DAFTAR TABELix

BAB I PENDAHULUAN1

- 1.1. Latar Belakang Masalah1
- 1.2. Rumusan Masalah6
- 1.3. Tujuan Penelitian7
- 1.4. Manfaat Penelitian7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA9

- 2.1. Konsep Pengawasan9
 - 2.1.1. Pengertian Pengawasan9
 - 2.1.2. Tujuan Pengawasan11
 - 2.1.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengawasan13
 - 2.1.4. Metode Pengawasan14
 - 2.1.5. Indikator Pengawasan15
 - 2.1.6. Cara Pengawasan16
- 2.2. Konsep Motivasi17
 - 2.2.1. Pengertian Motivasi17
 - 2.2.2. Teori-Teori Motivasi20
 - 2.2.3. Jenis-Jenis Motivasi24
 - 2.2.4. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Motivasi26

2.2.5. Indikator Motivasi.....	28
2.3. Kinerja Karyawan	29
2.3.1. Pengertian Karyawan	29
2.3.2. Arti Penting Kinerja	31
2.3.3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja	31
2.3.4. Indikator Kinerja	33
2.3.5. Tujuan Penilaian Kerja	35
2.4. Penelitian Terdahulu	38
2.5. Kerangka Konseptual.....	39
2.6. Hipotesis Penelitian.....	40
 BAB III METODE PENELITIAN.....	 41
3.1. Objek dan Waktu Penelitian	41
3.2. Desain Penelitian.....	41
3.3. Definisi Operasional Variabel.....	41
3.4. Populasi dan Sampel	43
3.5. Jenis dan Sumber Data	44
3.6. Teknik Pengumpulan Data	44
3.7. Prosedur Penelitian.....	45
3.8. Metode Analisis Data.....	49
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	53
4.1.1. Sejarah Singkat Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa	53
4.1.2. Visi dan Misi Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa	56
4.1.3. Struktur Organisasi.....	60
4.1.4. Tugas Pokok dan Fungsi	60
4.1.5. Deskripsi Data Identitas Responden.....	62
4.2. Interpretasi Data Hasil Penelitian	64
4.2.1. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas	64
4.2.2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian.....	66

4.2.3. Analisis Regresi Berganda	78
4.2.4. Analisis Koefisien Korelasi	80
4.3. Pembahasan Hasil Penelitian	82

BAB VPENUTUP

5.1. Kesimpulan	87
5.2. Saran-Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Struktur Pemerintahan Desa.....	60
Tabel 2 : Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	62
Tabel 3 : Persentase Responden Berdasarkan Usia	63
Tabel 4 : Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir	63
Tabel 5 : Hasil Uji Validitas.....	65
Tabel 6 : Hasil Uji Reliabilitas	66
Tabel 7 : Skala Penilaian Jawaban Responden.....	67
Tabel 8 : Nilai (Skor) Gaya Kepemimpinan Otoriter (X1)	68
Tabel 9 : Nilai (Skor) Gaya Kepemimpinan Partisipatif (X2)	70
Tabel 10 : Nilai (Skor) Gaya Kepemimpinan Delegatif (X3)	73
Tabel 11 : Nilai (Skor) Pelaksanaan Pembangunan (Y)	76
Tabel 12 : Rangkuman Hasil Analisis Regresi Berganda.....	79
Tabel 13 : Koefisien Korelasi	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah mengisyaratkan dengan jelas bahwa keberadaan suatu pemerintahan dibawahnya menjadi tanggungjawab bersama. Penerapan otonomi daerah telah membuka mata bagi semua elemen tentang pentingnya pembangunan dan pengembangan sumberdaya manusia.

Lahirnya undang-undang yang mengatur tentang pemerintah desa adalah merupakan turununan dan aturan tentang pemerintah daerah, dimana berdasarkan peraturan tersebut desa berkesempatan untuk mengurus sendiri urusannya dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan mengedepankan kearifan lokal yang ada. Tanggung jawab pemerintah desa dalam membangun desanya sendiri dengan selalu berpegang teguh pada adat istiadat, asal-usul serta prakarsa masyarakat setempat. peran utama pemerintah desa terletak pada kemampuan pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan, kemajuan desa yang dapat dilihat dari segi pembangunan, pelayanan maupun pemberdayaan tidak semata-mata lahir begitu

saja melainkan berkat kerja keras dan kesanggupan dan keahlian seorang pemimpin dalam menggerakkan, memotivasi dan menginspirasi serta memiliki jiwa leadership yang mumpuni.

Desa yang merupakan bagian terkecil dalam pemerintahan suatu Negara tidak bisa dipandang sebelah mata, keberadaan desa sejak dulu sebagai tonggak cikal bakal berdirinya suatu Negara. Keberadaan desa yang terbentuk dari persekutuan keluarga yang memiliki kesepakatan dan tempat serta wilayah yang menjadi ketetapan bersama dengan melihat asal-usul dan kebudayaan dari masing-masing kelompok yang kemudian bersatu dengan kebaikan bersama merupakan landasan ideal sebagai modal utama dalam membentuk sebuah Negara. Adanya penerapan otonomi, memaksa desa menjalankan apa yang menjadi titik berat dari pelaksanaan otonomi yakni dengan bersandar pada aturan yang ada, maka otonomi desa yang dibiasa disebut dengan otonomi lokal.

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang tidak lepas dari pemimpin dalam hal ini kepala desa di tuntut untuk menunjukan keberhasilan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat. Lahirnya undang-undang tentang desa yang didalamnya mengatur juga tentang pembiayaan dan anggaran yang harus dikelola dalam menunjang keberlanjutan kehidupan dalam suatu wilayah tertentu. Penganggaran tersebut bersifat sebagai biaya yang harus dikelola oleh pemerintah desa yang diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat setempat.

Anggaran desa yang diatur dalam APBDes tersebut memuat tentang biaya pembangunan, biaya pelayanan, biaya pemberdayaan, belanja kantor, dan insentif kepala desa, aparatur desa serta lembaga desa seperti BPD harus dapat dikelola

dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan azas kemanfaaan. Anggaran desa tersebut dikenal dengan Alokasi Dana Desa, dimana ADD tersebut bersumber dari pemerintah pusat dan hibah daerah yang ditujukan untuk membangun desa dengan efektif dan efisien. Slogan presiden Joko Widodo yakni membangun dari desa telah memberikan kesempatan yang besar buat pemerintah desa untuk mengelola anggaran yang dikucurkan melalui Alokasi Dana Desa tersebut.

Salah satu kunci keberhasilan pengelolaan dana tersebut berada ditangan pemimpin desa yang biasa disebut kepala desa. kemampuan, keahlian bahkan gaya kepala desa dalam kepemimpinannya sangat mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan dan pengelolaan dana desa tersebut. Salah satu ciri khas pemimpin dapat dilihat dari gaya yang menjadi karakteristik pemimpin, hal ini juga berlaku bagi kepala desa, dimana gaya kepemimpinan dapat menggambarkan sikap, perilaku seorang pemimpin apakah dengan menggunakan gaya tersebut seorang kepala desa dapat dikatakan berhasil atau tidak.

Kepemimpinan seorang kepala desa dapat dilihat juga dengan mengetahui sejauhmana keahlian dan kemampuannya dalam memanejemen pemerintahan dan mengelola keuangan desa dan alokasi dana desa agar mampu menciptakan pengelolaan yang efektif dan efisien serta berdaya guna dan berhasil guna. Seorang kepala desa dituntut mampu menggerakan, memotivasi bawahannya agar dapat mengikuti apa yang menjadi kehendak seorang pemimpin, karena seorang kepala desa memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam melakukan tugas sehari-hari yang diembannya sehingga tujuan yang direncanakan dapat dengan mudah dicapai.

Desa yang dikatakan berhasil apabila dipimpin oleh seorang kepala desa yang benar-benar memiliki kapabilitas dan keahlian sebagai seorang pemimpin dalam membangun dan menciptakan kondisi yang nyaman dan tenram bagi kehidupan masyarakatnya. Keberhasilan pembangunan yang menjadi ikon keberhasilan desa tergantung juga dari gaya kepemimpinan yang diterapkan, dimana ada beberapa gaya yang sering menonjol dan banyak diterapkan oleh para pemimpin terutama kepala desa, gaya kemimpinan tersebut misalnya gaya kepemimpinan otokrasi, demokrasi, kharismatik, transformasional, transaksional maupun *laissez Faire*. Gaya kepemimpinan seseorang dapat menggambarkan tindakan, perilaku, maupun sikap yang ditunjukan pada saat-saat memerintah atau dalam keseharian dalam organisasi. Kepala desa salah satunya yang sering menggunakan gaya-gaya tersebut.

Gaya kepemimpinan kepala desa sering menjadi tolak ukur dalam pelaksanaan pembangunan desa, kepala desa harus bisa menerapkan gaya kepemimpinan dalam menjalankan proses pembangunan, sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi semua tergantung dari bagaimana seorang kepala mampu menjalankan pola dan gaya kepemimpinan yang bisa memotivasi dan memobilisasi masyarakatnya untuk sama-sama ikut serta dan berpartisipasi pada setiap proses pembangunan desa. kepala desa harus berhati-hati dalam menggunakan perannya dan gayanya agar tidak menjadi hal yang menghambat pembangunan.

Pembangunan desa yang dibiayai atau bersumber dari Alokasi dana desa adalah dibawah tanggung jawab kepala desa. dibutuhkan gaya kemimpinan kepala

desa untuk dapat menciptakan dan menghasilkan pembangunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat. Pengelolaan ADD diharapkan bisa dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, sehingga dituntut kepada kepala desa untuk dapat mengelola hal itu dengan semestinya. Gaya kepemimpinan kepala desa juga harus dapat mencerminkan baik tidaknya proses pengelolaan ADD terutama dalam pelaksanaan pembangunan desa.

Observasi peneliti dilapangan dan juga pengamatan yang dilakukan didapatkan bahwa kepala desa mootilango kecamatan duhiadaa sering mendapat masukan dan kritikan dari masyarakatnya. Pelaksanaan pembangunan didesa mootilango sudah berjalan dengan baik karena pemerintah desa mampu menggunakan dan mengelola Alokasi Dana Desa untuk pembangunan sesuai dengan peruntukannya. Namun hal tersebut belumlah bisa dikatakan sempurna, hal ini disebabkan oleh masih adanya keluhan dari elemen masyarakat berkaitan dengan gaya kepemimpinan kepala desa. salah satunya adalah belum adanya transparansi anggaran dalam penggunaanya, penggunaan ADD tidak sepenuhnya digunakan pada pembangunan semata, akan tetapi sebagian digunakan untuk pemberdayaan dan belanja pegawai.

Sesuai proporsi ADD yang diperuntukkan berbeda dengan cakupan masing- masing dengan pembagian lingkup kegiatan yakni 70% untuk pemberdayaan masyarakat serta 30% untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa. Namun pada kenyataannya, pembiayaan program pembangunan pada bidang pembangunan desa, tidak terealisasi melalui ADD melainkan dari Dana Desa (DD). Pembangunan yang dilaksanakan dengan

menggunakan DD adalah betonisasi jalan desa. Sehingga peneliti menarik untuk mengkaji pengaruh gaya kepemimpinan kepala desa terhadap pemberian pembangunan yang bersumber dari ADD.

Berangkat dari pemikiran dan kajian yang mendalam maka peneliti memformulasikan judul penelitian dengan mengangkat persoalan gaya kepemimpinan kepala desa dengan menetapkan judul **“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Yang Bersumber Dari Alokasi Dana Desa, (Studi Kasus Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato).**

1.1.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan berupa gaya kepemimpinan gaya kepemimpinan otoriter (X₁), gaya kepemimpinan partisipatif (X₂), dan gaya kepemimpinan delegatif (X₃) *Secara Simultan* terhadap pelaksanaan pembangunan desa yang bersumber dari ADD, studi kasus di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato?
2. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan berupa gaya kepemimpinan gaya kepemimpinan otoriter (X₁), gaya kepemimpinan partisipatif (X₂), dan gaya kepemimpinan delegatif (X₃) *Secara Parsial* terhadap pelaksanaan pembangunan Desa yang bersumber dari ADD, studi kasus di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato?

1.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan berupa gaya kepemimpinan gaya kepemimpinan otoriter (X₁), gaya kepemimpinan partisipatif (X₂), dan gaya kepemimpinan delegatif (X₃) *Secara Simultan* terhadap pemberian program pembangunan yang bersumber dari ADD, studi kasus di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato.
2. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan berupa gaya kepemimpinan gaya kepemimpinan otoriter (X₁), gaya kepemimpinan partisipatif (X₂), dan gaya kepemimpinan delegatif (X₃) *Secara Parsial* terhadap pemberian program pembangunan yang bersumber dari ADD, studi kasus di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato.

1.3. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yakni sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap pemberian program pembangunan desa yang bersumber dari ADD. Penting untuk dipahami bahwa kepala desa merupakan pemimpin formal di desa yang fungsi dan perannya sangat berpengaruh pada pembangunan desa. Selain itu penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan pustaka dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Selain secara akademisi, kontribusi penelitian ini dimungkinkan untuk bisa menjadi sumbangsih penambahan khasanah keilmuan dan pengembangan wawasan bagi siapa saja yang membacanya, dan juga diharapkan menjadi acuan referensi bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Kepemimpinan

2.2.1. Pengertian Pemimpin

Pengertian pemimpin dan kepemimpinan pada dasarnya saling ada keterkaitan antara keduanya. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai perilaku, sikap, tindakan yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan pemimpin lebih tertuju pada individu yang memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, karena pemimpin adalah orang menjalankan kepemimpinan, sehingga diantara keduanya tidak dapat dipisahkan. Banyaknya definisi dan pengertian mengenai pemimpin dan kepemimpinan akan tetapi kesemuanya merujuk pada perilaku dan kepribadian seseorang dalam menjalankan sebuah kekuasaan.

Seperti halnya definisi kepemimpinan yang disampaikan oleh Kartini Kartono, (1994: 33) sebagai berikut: “dalam arti luas seseorang yang disebut pemimpin adalah ia yang bisa menjadi contoh yang memiliki keahlian dalam mengurus, mengatur, mengendalikan dan mengarahkan orang dan kelompok untuk menempuh upaya dan usaha dalam menggapai tujuan serta dia yang mampu membimbing dan menuntun bawahan dalam mengikuti apa yang dikehendaki.

Pengertian yang disampaikan tersebut diatas, menggambarkan tindakan seseorang yang memiliki kelebihan dibandingkan dengan orang lain, yang terkadang jiwa tersebut terbawa sejak dia lahir atau merupakan bagian dari kehendak sehingga seseorang bisa jadi pemimpin. Kelebihan dan bakat bawaan membuat seseorang mempunyai kekuatan dan kewenangan dalam menggerakkan orang lain serta mendapatkan pengakuan dari bawahan untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang pemimpin dapat dikatakan sebagai pribadi yang mempunyai kecakapan khusus dibandingkan orang lain yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok yang dipimpinnya bersama-sama bergerak untuk berusaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

“Konsep kepemimpinan juga dijelaskan dalam pemahaman lain seperti yang bersumber dari bukunya S. Pamudji (1995:5) bahwa “kata kepemimpinan adalah berasalah dari kata pompin yang berarti menuntun, dan membimbing dilakukan oleh individu yang diberikan kepercayaan untuk memimpin, yang kemudian diimbuh dengan ke-an sehingga menjadi kepemimpinan”.

Lain halnya dengan apa yang disampaikan oleh Wahjousumijo (1994:12) tentang kepemimpinan dengan mengemukakan pernyataan, “kepemimpinan ialah

kemampuan atau kesanggupan seseorang mengfluence kepribadian dalam menrumuskan dan mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pendapat lain ditulis seperti berikut”:

Kepemimpinan dirarikan juga sebagai knowledge dan skill seseorang yang menduduki jabatan sebagai pemimpin dalam organisasi dengan perilakunya dapat mempengaruhi orang atau yang dipimpinnya, untuk berusaha berpikir, bertindak sesuai dengan kondisi tertentu sehingga melalui kepribadian yang positif dia memberikan kontribusi nyata pada pencapaian tujuan organisasi (S. P. Siagian,1991:75)

Individu dapat dikatakan pemimpin apabila dia memiliki orang yang dipimpinnya artinya adalah pemimpin harus memiliki bawahan atau pengikut karena keduanya saling bertalian dan tidak bisa terpisah.

Begitu juga dikemukakan oleh Kartini Kartono (1994:11) bahwa keutamaan dari kepemimpinan adalah sebagai penggerak dan memiliki kemampuan sebagai mengkoordinir sumberdaya manusia, sumberdaya alam, pengelolaan dana dalam satu organisasi. Sedangkan Pamudji dalam bukunya (1995:22) berpikiran bahwa, “kemampuan seorang pemimpin dalam menggerakan dan mengarahkan bawahan kepada tujuan yang dikehendaki bersama.

Secara sederhana dapat ditunjukan dengan definisi diatas mencerminkan kepemimpinan tersebut kedalam beberapa unsur yaitu:

1. Individu yang membuat orang lain terpengaruh
2. Orang yang dipengaruhi disebut bawahan
3. Tercipta kerja sama yang baik

4. Memiliki tujuan tertentu untuk dicapai

Dari pengertian tersebut juga melahirkan fungsi kepemimpinan dalam sebuah organisasi adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan dan Memprakarsai penyusunan struktur dalam organisasi.
2. Menjalin koordinasi dan pengintegrasian organisasi, agar keseluruhan dapat beroperasi secara efektif.
3. Perumusan tujuan organisasi atau institusional dalam menentukan sarana serta metode yang efisien dalam rangka pencapaian tujuan.
4. Menjadi penengah konflik dan menyelesaikan agar tidak terjadi konflik berikutnya.
5. Melakukan perbaikan, inovasi, perubahan serta pengembangan dan penyempurnaan dalam organisasi.

Bersandar pada pengertian yang terurai diatas, maka secara sederhana dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan yang dijalankan seseorang akan sangat bergantung pada kondisi tertentu dimana seseorang dapat mempengaruhi orang lain untuk ikut serta dan patuh terhadap apa yang menjadi keinginan dan perintahnya baik secara perorangan ataupun kelompok, karena pemimpin dalam kondisi-kondisi tertentu harus dapat menunjukkan jiwa kepemimpinannya sebagai cerminan kelebihan dan kecakapan yang dimiliki dalam menggerakkan orang lain.

Mempengaruhi orang-orang tersebut sangat dibutuhkan metode dan cara yang tepat dengan menggunakan teknik tertentu sehingga pemimpin bisa menjalankannya. Seperti halnya Suradinata (1997:24) mengemukakan bahwa

teknik kepemimpinan merupakan seni dan bakat seseorang sejak dia lahir yang dipraktekan dalam proses memimpin.

Sedangkan Pamudji (1995:114) mengatakan bahwa, “seorang pemimpin harus memiliki teknik kepemimpinan berupa metode dan pola tetap untuk membuat orang-orang mengikuti bergerak ke arah yang di inginkan pemimpin”.

Adapun teknik-teknik kepemimpinan menurut Arifin Abdulrachman dalam pamudji (1995:114) adalah:

1. Teknik pemantapan dan penyiapan pengikut
2. Teknik menjalin hubungan atau relasi
3. Teknik bisa diteladani
4. Teknik pendekatan atau persuasif dalam pemberian perintah
5. Teknik menggunakan komunikasi yang bisa dipahami
6. Teknik penyediaan sarana dan prasarana maupun fasilitas.

2.1.2. Jenis-jenis Kepemimpinan

Menurut Kartini Kartono (1992:8) jenis kepemimpinan dapat digolongkan kedalam dua jenis pemimpin sebagai berikut:

1. Pemimpin formal adalah seseorang yang ditunjuk oleh organisasi atau organisasi tertentu sebagai pemimpin, bersandar pada keputusan dan penunjukan formal untuk mengambil posisi struktur organisasi dengan semua hak dan kewajiban terkait posisi untuk mencapai tujuannya.
 - a) Sebelum diangkat, seseorang ditetapkan terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan formal.

- b) Dukungan dari organisasi formal dibutuhkan dalam menjalankan kewajibannya apabila ia memiliki atasan.
 - c) Mendapatkan jasa secara materil imateril tertentu serta insentif yang menjadi hak.
 - d) Mendapatkan promosi dan jenjang kepangkatan formal dan mutasi.
 - e) Ketika melakukan pelanggaran dan kesalahan maka diberlakukan sanksi dan hukuman.
 - f) Diberikan kekuasaan dan wewenang selam menjabat, baik dalam penentuan posisi, memotivasi bawahan dalam bekerja, membuat garis pedoman yang akan diikuti membuat keputusan-keputusan penting.
2. Pemimpin informal adalah mereka yang tak memiliki penunjukan resmi sebagai pemimpin, tetapi karena ia memiliki beberapa kualitas luar biasa, ia telah mencapai posisi sebagai orang yang memiliki dapat mempengaruhi keadaan psikologis dan karakter kelompok atau masyarakat.
- Ciri-ciri pemimpin informal antara lain:
- a. Tidak dilakukan melalui penunjukan formal atau pengakuan sebagai pemimpin.
 - b. Orang-orang atau kelompok sosial menunjuk diri mereka sendiri dan mengenalinya sebagai seorang pemimpin. Status kepemimpinannya ada selama komunitas yang bersangkutan mengakui dan menerimanya.
 - c. Tidak ada dukungan dari suatu organisasi dalam menjalankan tugasnya
 - d. Terkadang tidak mendapatkan imbalan jasa atau gaji kecuali diberikan secara sukarela.

- e. Tidak bisa dipindahkan, tidak ada promosi dan tidak diharuskan memiliki persyaratan formal.
- f. Ketika melakukan kesalahan dalam kepemimpinannya tidak dapat diberikan sanksi ataupun hukuman.

Pendapat tersebut dapat menunjukkan bahwa pemimpin menduduki jabatan kepemimpinannya disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Adanya penetapan dan penunjukan yang dilakukan oleh atasan.
2. Biasanya didapatkan karena faktor keturunan.
3. Dipilih secara langsung oleh pengikutnya atau orang banyak
4. Karena terdapat pengakuan dari bawahannya.
5. Memiliki kelebihan tertentu serta memiliki kualitas secara
6. Biasanya adanya tuntutan pada kondisi dan situasi.

2.1.2. Karakteristik Dan Syarat-Syarat Kepemimpinan

Pada intinya seorang pemimpin ketika dalam menjalankan fungsi harus didukung oleh 3 (tiga) faktor untuk melakukan tugasnya dipengaruhi oleh cara dan berbagai faktor yang terdiri dari kekuasaan, kemampuan dan kewenangan. Kekuasaan yang dimaksud disini adalah legitimasi dari orang atau lembaga untuk memimpin orang lain untuk mencapai tujuan. Kemampuan artinya kesanggupan yang dimiliki seseorang seperti keterampilan dan keahlian dalam bidang tertentu. Sedangkan kewenangan adalah legitimasi formal secara administrasi adalah hak pemimpin yang dipatuhi oleh bawahan.

Adapun Suradinata (1995:79) Mengatakan pemimpin sebuah organisasi dapat dikatakan sukses, apabila memiliki beberapa kondisi, antara lain:

1. Memiliki pengetahuan lebih agar dapat memikirkan serta memecahkan segala persoalan yang dapat menghambat proses kepemimpinan dan menyelesaikan dengan cara yang bijak.
2. Memiliki kecerdasan emosional, tidak mudah berubah dan terbawa suasana dapat mampu menempatkan diri pada persoalan pribadi dan organisasi.
3. Memiliki keahlian lain dalam menghadapi berbagai macam karakter bawahan bisa menyenangkan dan memuaskan bawahan.
4. memiliki keterampilan dalam menggerakkan dan mengorganisasikan tujuan dengan bijaksana.
5. Memiliki ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
6. Memiliki fisik yang sehat.

Kemudian Pamudji (1995:91) menjabarkan ciri, sifat yang perlu ditumbuh kembangkan oleh para pemimpin instansi pemerintah di Indonesia, yaitu:

1. Menciptakan keadilan
Kemampuan untuk memandang sama dengan bawahan tidak mendiskriminasi satu sama lain. Keadilan diatas segalanya yang diberikan kepada dari mereka yang telah menjadi hak atau bagian mereka.
2. Memiliki kearifan dan kebijaksanaan
Cakap dan pandai dalam bertindak, serta berbuat dalam menghadapi orang lain.
3. Kemampuan dalam berinisiatif
Dapat menginspirasi orang lain sehingga bisa menggerakkan orang lain.
4. Memiliki rasa percaya diri

Salah satu kesemimbangan dalam setiap jiwa adalah kepercayaan terhadap diri sendiri sehingga menimbulkan energy positif dan optimis dalam mencapai tujuan.

5. Memiliki Kharisma tersendiri

Psikologi dan gesture yang dapat memikat perhatian orang lain seperti gaya berbicara, penampilan, dan bahasa tubuh.

6. Ulet

tidak putus asa ketika berhadapan dengan kesulitan dan kesukaran dan selalu dapat melaluinya.

7. Ketepatan dalam mengambil keputusan

Ketepatan, ketanggapan dan ketegasan, tidak mudah bimbang Menggambarkan sehingga segala sesuatu dapat dilakukan

8. Kejujuran

Kejujuran adalah diatas segala-galanya merupakan sifat yang patut menjadi jaminan untuk selalu mengedepankan kepentingan organisasi.

9. Keberanian mawas diri

Membahas lebih lanjut apabila lalai dengan melihat sifat kelemahan yang ada terdapat pada diri.

10. Komunikatif

Memiliki kemudahan Dalam menyampaikan sesuatu kepada pihak lain, memakai metode dan gaya yang mudah diterima.

2.1.3. Tipe dan Gaya Kepemimpinan

Mewujudkan efektifitas pemimpin bukan hal mudah, terdapat faktor penujang yang mesti dipertimbangkan oleh seseorang dalam memimpin organisasi. Faktor yang dimaksud adalah adanya tipe dan gaya kepemimpinan yang dapat dijalankan. Ciri khas seseorang dalam memimpin di sebut sebagai tipe kepemimpinan karena hal itu sifat khusus yang dimiliki dalam menahkodai organisasi dan memiliki pengaruh dalam mencapai tujuan.

Selain tipe kepemimpinan diatas, Wahjousumidjo (1984:102) menjabarkannya kedalam 4 (empat) tipe, yaitu:

1. Tipe Direktif

Tipe ini ditandai terjadinya komunikasi yang terjadi satu arah. Bawahan diberikan batasan oleh pimpinan dalam berperan, ia hanya memerikan petunjuk apa, dimana, kapan dan bagaimana bawahan melaksanakan tugas tertentu. Sedangkan dalam pengambilan keputusan dan pemecahan masalah murni adalah tanggung jawab pimpinan, setelah selesai kemudian disampaikan kepada bawahan. Pimpinan seperti selalu mengawasi pekerjaan dengan ketat.

2. Tipe konsultatif

Pemimpin yang dalam pengambilan keputusan selalu melakukan konsultasi dengan orang lain atau bawahan.

3. Tipe partisipasi

Pelibatan bawahan dalam pengambilan keputusan serta kontrol dalam pemecahan masalah secara bersama. Peningkatan komunikasi dua arah dan secara intensif mendengarkan masukan bawahan, karena penyelesaian masalah

dan pengambilan keputusan bukan hanya ditangan pimpinan tetapi terkadang bawahan juga memiliki kecakapan untuk itu.

4. Tipe delegatif

Pimpinan dengan tipe ini sering menyelesaikan masalah melalui diskusi dengan bawahan dan kemudian menyerahkan keputusan itu seluruhnya ke bawahan.

Berbeda dengan wahjosumidjo, Soekanto Reksohadiprodjo (1989:297) juga menyumbangkan pemikirannya mengenai tipe pemimpin kedalam tiga macam gaya yakni :

1. Kepemimpinan dengan Gaya Otokratis

Kekuasaan berada pada tangan seorang (*a one orchestra*).

Sifat pemimpin seperti ini dapat dikenali dengan ciri atau sifat antara lain; perintah yang diberikan harus selalu diikuti, kebijakan yang ditentutkan tanpa melalui konsultasi bersama dengan bawahan, perencanaan kedepan tentang sesuatu tidak dijelaskan secara detail namun hanya memberikan langkah-langkah yang harus dijalankan. Memuji loyalitas bawahan yang menuruti kehendaknya, dan sering mengkritisi bagi bawahan yang selalu berseberangan.

2. Kepemimpinan dengan gaya Demokratis

Setiap keputusan dan perintah yang dilakukan selalu melalui hasil musyawarah dengan bawahan atau masyarakat. Kebijakan yang dilahirkan harus mendapat persetujuan kelompok masyarakatnya, terlebih dahulu memberikan petunjuk tentang rencana yang akan dilaksanakan sebelum memberikan perintah untuk

dilaksanakan. Setiap permasalahan yang timbul baik atau buruk salah atau benar menjadi tanggung jawab bersama untuk diselesaikan.

3. Laissez-faire

Tipe ini lebih pada pemimpin yang bebas dalam mengendalikan apapun. Terkadang ia tidak pernah mengendalikan/memimpin bawahannya, seakan-akan, antara bawahan dan pimpinan tidak ada ikatan apapun.

Jika Anda melihat tiga jenis kepemimpinan, kita dapat mengatakan bahwa jenis-jenis kepemimpinan dapat dilihat dari gaya yang dijalankan setiap pemimpin untuk menjalin kerja sama dengan para bawahan dan atasannya.

Berbeda dengan apa yang dikemukakan S.P. Siagian (1985:41) bahwa Kepemimpinan dilihat dari bentuk organisasi yaitu:

1. Otokratis

Pemimpin yang otokratis memiliki ciri :

- a. Organisasi yang dipimpinan dianggap sebagai organisasi pribadi
- b. Menyamakan tujuan organisasi dengan tujuan
- c. Memperlakukan bawahan hanyalah semata-mata alat
- d. Menolak segala kritik, saran dan pendapat yang
- e. Selalu Menggantungkan diri pada kekuasaan
- f. Mempergunakan cara yang bersifat unsur paksaan didalamnya dan memaksa setiap tindakan yang dilakukan

Melihat ciri dan karakteristik ini, jelas bahwa tipe pemimpin ini tidak lagi cocok dipergunakan untuk organisasi pada era sekarang ini.

2. Militeristik

Tipe militer adalah tipe pemimpin yang mengendepankan ketegasan, ketangkasan bawahan yang membedakannya dengan tipe yang lain terletak pada hirarki dan garis perintah dari atas kebawah. Tipe ini memiliki ciri dan sifat :

- a. Dalam menggerakkan bawahan didasarkan pada sistem perintah yang berlaku
- b. Yang dapat menggerakkan bawahan hanyalah mereka yang memiliki pangkat dan jabatan tertinggi
- c. Selalu kelihatan formal.
- d. Disiplin adalah tuntutan tertinggi sehingga bawahan jadi kaku
- e. Tidak mau menerima kritikan dari bawahannya.
- f. Segala proses kegiatan gemar dengan upacara-upacara

Sifat pemimpin seperti militeristik bukanlah pemimpin yang ideal karena sifat dan karakteristiknya sulit diterapkan pada organisasi selain mileter

3. Paternalistik

Golongan pemimpin dengan tipe paternalistik memiliki ciri dan sifat :

- a. Bawahan dianggap sebagai manusia tidak dewasa
- b. Sikap yang terlalu melindungi (*over protected*).
- c. Dalam pengambilan keputusan bawahan jarang diberikan kesempatan
- d. Bawahan tidak diberikan kesempatan untuk mengambi inisiatif.
- e. Bawahan jarang mendapatkan kesempatan mengembangkan fantasi dan daya kreasi
- f. Selalu ingin tahu.

Dalam keadaan tertentu ciri dan sifat pemimpin seperti ini dapat diperlukan namun, dengan banyaknya sifat negatif terkadang menyebabkan tipe dan gaya ini jarang diterapkan.

4. Kharismatik

Para ilmuwan belum menemukan penyebab karisma pemimpin. Seperti yang Anda tahu, para pemimpin seperti itu sangat menarik sehingga mereka umumnya memiliki banyak pengikut. Dikatakan bahwa pemimpin seperti itu adalah manusia super karena kurangnya pengetahuan tentang alasan mengapa seseorang menjadi pemimpin yang karismatik. karisma, kekayaan, usia, kesehatan, atau informasi pribadi. Mahatma Gandhi bukan orang kaya, Iskander Zulkarnayin adalah orang yang sehat secara fisik, dan John Kennedy adalah pemimpin yang karismatik. Terlepas dari usianya, sehingga mudah baginya untuk menjadi presiden Amerika Serikat, Gandhi tidak dapat digambarkan sebagai orang yang "tampan" ..

5. Demokratis

Pada era modern saat ini banyak sekali tipe dan gaya kepemimpinan yang cenderung menjadi ciri khas sesorang dalam memimpin, tetapi banyaknya pengetahuan tentang teori kepemimpinan, tipe demokratislah yang banyak digemari dan dianggap paling ideal diterapkan pada organisasi besar dan kecil karena :

- a. Menggerakkan bawahannya selalu mengedepankan bahwa manusia adalah sama sebagai mahluk tuhan

- b. Adanya upaya mensingkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan pribadi bawahannya.
- c. Saran, kritik, pendapat yang disampaikan oleh bawahan hal yang paling dibutuhkan
- d. Dalam usaha mencapai tujuan selalu berusaha mengutamakan kerjasama dan *teamwork*.
- e. Selalu ikhlas menerima kesalahan bawahan dan memberikan kesempatan kepada bawahan tersebut untuk memperbaikinya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama tersebut.
- f. Berupaya menjadikan bawahan lebih baik dari dirinya
- g. Selalu mengembangkan kapasitas diri untuk bisa menjadi pemimpin yang disegani.

Banyak pemimpin yang mengalami kesulitan dalam menerapkan tipe demokratis diatas, karena bukanlah hal mudah menjadi pemimpin dengan gaya tersebut, namun gaya demokratis adalah paling ideal diterapkan dalam setiap organisasi. Sehingga sangat diharapkan pemimpin yang berupaya demokratis.

Berbagai jenis / gaya pemimpin yang melakukan organisasi memiliki efek yang berbeda pada perilaku individu dan perilaku organisasi. Misalnya, berpartisipasi dalam penentuan keputusan dalam pemimpin yang demokrasi dapat meningkatkan kepemimpinan dan hubungan bawahan, meningkatkan moral dan kepuasan kerja, dan mengurangi ketergantungan pada pemimpin. Namun, ini dapat menyebabkan kerugian karena produktivitas menurun dan menjadi lebih

sulit untuk mencapai proses pengambilan keputusan yang memuaskan semua pemangku kepentingan.

Miftah Thoha (2013:49) menyatakan ”gaya kepemimpinan mencerminkan moral atau perilaku individu yang digunakan ketika berusaha mempengaruhi yang lainnya”. Sedangkan Miftah Thoha (2013:62) menggolongkan gaya kepemimpinan kedalam 4 (empat) macam apabila ditinjau dari tingkat kematangan para pengikut yaitu:

1. Instruktif, Untuk pengikut yang kurang matang. Ketidakmampuan atau kurang percaya diri pada seseorang yang tidak bisa melakukan sesuatu dan bertanggung jawab.
2. Konsultasi, adalah Tingkat kematangan yang rendah. Tidak bisa tidak mengambil tanggung jawab, percaya diri tetapi kurang dewasa.
3. Partisipasi, Karena kedewasaan diri mereka yang tinggi. Orang dengan tingkat kedewasaan biasanya punya kemampuan, namun tidak ingin melakukan tugas-tugas tertentu.
4. Delegasi, Karena kedewasaan mereka yang tinggi. Orang dengan tingkat kedewasaan ini tahu dan yakin akan tanggung jawab mereka.

Bicara lebih lanjut mengenai gaya kepemimpinan S. Pamudji (1987:65) membedakan atas tiga gaya, yaitu:

1. Gaya Motivasi (*Motivation Style*)

Dengan kata lain, mereka adalah pemimpin yang menggunakan motivasi untuk menggerakkan orang, baik dalam bentuk hadiah finansial dengan memberikan

hadiah. Motivasi adalah positif dan negatif adalah motivasi dalam bentuk ancaman hukum.

2. Gaya Kekuasaan (*Power Style*)

Pemimpin yang suka dengan cara-cara yang keras karena merasa orang yang terkuat. Penggunaan kekuatannya mencerminkan apa yang menjadi gayanya, yaitu:

- a. Gaya otokrasi, Yaitu, gaya yang sering menjadi momok dalam organisasi, dikarenakan orang dengan gaya ini biasanya menjalankannya dengan kekerasan, pengerahan kekuatan dan bertumpu pada satu garis komando yang condong pada otoriter yang selalu memanfaatkan bawahan adalah alat untuk kepentingan pribadi sehingga tujuan sulit tercapai. Ia menganggap bahwa kekuasaan adalah miliknya sendiri tidak pernah memikirkan orang lain atau bawahan, maunya di hormati dipatuhi tanpa memperhatikan kondisi yang sebenarnya.
- b. Gaya demokratik, gaya yang baik karena menganggap manusia sebagai makhluk bermartabat dan menghormati hak-hak mereka harus dihormati. Gunakan keterlibatan anggota yang persuasif dan gerakkan lebih banyak pengikut untuk memberikan contoh.
- c. Gaya bebas, yaitu Gaya kepemimpinan yang hanya mengikuti kehendak pengikut menghindari penggunaan kekuatan dan tekanan.

3. Gaya Pengawasan

Yakni gaya ini lebih condong pada kebiasaan pemimpin yang tidak mempercayai bawahan sehingga terkesan selalu mengawasi gerak gerik bawahan. Dalam gaya ini dapat dibedakan atas:

- a. Gaya pengawasan Seorang pemimpin yang selalu memperhatikan karyawannya sebagai orang yang berorientasi pada karyawan, bermartabat. Pemimpin mengenali kebutuhan pengikut dan menghormati keinginan mereka.
- b. Gaya pengawasan Ini adalah pemimpin yang selalu berorientasi pada produksi (berorientasi produksi), yaitu proses produksi dan metodenya. Karena peningkatan dalam metode dan sumber daya manusia, koordinasi metode ini diharapkan untuk mencapai hasil yang maksimal. Dalam hal ini, Anda perlu menyesuaikan untuk proses pembuatan.

Sedangkan menurut pendapat Hasibuan (2007:170) gaya kepemimpinan Uraian tipe dan gaya kepemimpinan tersebut menggambarkan bahwa Seorang pemimpin diharapkan dapat mengimplementasikan tipe kepemimpinannya secara tepat, hal ini dimaksudkan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan kerja yang membuat nyaman bagi anggota organisasi. Seorang pemimpin harus mempertimbangkan penerapan gaya dan tipe kepemimpinan yang dapat terterima oleh bawahan, dimana seorang pemimpin yang dipilih harus dapat mengerti dan memahami potensi dan kemampuan yang dimiliki agar tipe dan gaya yang diterapkan menjadi efektif dan mendapat dukungan dari bawahan. Dengan demikian gaya kepemimpinan yang efektif akan menciptakan karyawan yang disiplin dan bisa digerakkan untuk mencapai tujuan organisasi.

2.2. Kepemimpinan Kepala Desa

Setiap desa memiliki pemimpin formal yang disebut walikota. Walikota desa adalah posisi resmi yang dapat mencakup menetapkan tujuan organisasi, memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan, dan memengaruhi kelompok dan orang lain yang memengaruhi peningkatan budayanya. Selain itu, kepala desa bertanggung jawab untuk membimbing peralatan masyarakat dan desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa.

Menurut Ariyani (2006:98) “kepala desa merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam masyarakat desa, mengemban tugas dan kewajiban pemerintahan dan pembangunan desa. Hal tersebut sesuai dengan undang-undang tentang desa, yang menyatakan bahwa kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasayarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu kewenangan kepala desa ialah melaksanakan pembangunan desa meliputi sarana fisik dan non fisik, sosial budaya serta ekonomi”.

Menurut Silambi (2014:135), “urusan pemerintahan dalam arti pelaksanaan urusan administrasi pemerintahan dan pengaturan kehidupan masyarakat yang dilimpahkan kepada kepala desa, urusan pemberdayaan masyarakat dalam penyedian sarana prasarana fasilitas umum seperti jalan, jembatan, irigasi, sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan kepada kepala desa dan urusan masyarakat berarti pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan kehidupan sosial budaya masyarakat seperti bidang kemasyarakatan, pendidikan sesuai kewenangan yang dilimpahkan kepada kepala desa”.

Kemudian Ariyani (2006:101) menyatakan bahwa “kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada masyarakat desa yang didalam tata cara dan prosedurnya, pertanggungjawabannya disampaikan kepada bupati atau walikota melalui camat. Kemudian bersama Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kepala desa berkewajiban memberikan keterangan laporan pertanggungjawabannya kepada masyarakat, menyampaikan informasi pokok pertanggungjawabannya”.

Salah satu tanggung jawab kepala desa adalah pengelolaan keuangan desa. Pendanaan desa berasal dari sumber pendapatan desa, termasuk pendanaan desa (ADD). Kepala desa dituntut untuk dapat secara aktif terlibat dalam manajemen keuangan dan membuat pilihan dalam pengembangan dan pemerintahan, dengan menggunakan sumber daya dan biaya potensial dari wilayahnya.

2.3. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Pembangunan daerah ditujukan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu tujuan penerapan otonomi daerah. Desa adalah pemerintah terkecil dan paling bawah yang membutuhkan titik berat dari pembangunan. Untuk itu perhatian pemerintah pusat sangat diharakan dalam membangun desa yang maju, yang bisa menjamin kesejahteraan masyarakat paling bawah. Pembinaan dan peningkatan pelayanan administrasi desa sangat diharapkan dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Todaro dalam Triwidodo (2014) menyatakan Pembangunan mungkin sangat penting, termasuk berbagai perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap sosial, dan lembaga negara, sambil terus mengejar percepatan struktur ekonomi, mengatasi ketidaksetaraan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan. Berdasarkan pemahaman ini, dapat dilihat bahwa pengembangan tidak hanya periode waktu tertentu, tetapi proses yang berkelanjutan atau kontinue melalui tahap-tahap tertentu.

Pembangunan desa menurut Adisasmita (2006:87) adalah “Keseluruhan proses pelaksanaan pembangunan yang ada didesa, dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat paling dalam menikmati hasil pembangunan. Sedangkan menurut (Tjokrowinoto dalam Triwidodo 2014) “Perlunya titik berat Pembangunan berada didesa sehingga serangkaian kegiatan yang dilakukan bukan di masyarakat desa tetapi di seluruh sendi desa dengan tujuan meningkatkan standar hidup masyarakat desa. Dengan kata lain, pembangunan desa yang dilaksanakan memiliki makna membangun masyarakat desa dengan memprioritaskan aspek kebutuhan masyarakat”.

Berdasarkan ketentuan Permendagri No.114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Rencana pengembangan desa diatur oleh pemerintah desa dengan tidak terlepas koordinasi antara kepala desa dan BPD dengan melibatkan pihak-pihak yang dapat berpartisipasi untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya desa untuk mencapai tujuan pembangunan desa. Proses tahapan aktivitas. Mengutip pendapat Sofiah (2015) yang dimuat dalam buku Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, “pembangunan desa mencakup bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa”.

Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan pembangunan desa yaitu sebagai berikut :

1. Tahapan Persiapan

Hal yang paling utama dalam pelaksanaan pembangunan ialah tahapan persiapan kegiatan. Tahapan persiapan sendiri meliputi:

- a) Penetapan pelaksanaan pekerjaan;
- b) Penyusunan rencana kerja ;

- c) Mensosialisasikan kegiatan;
 - d) Memberikan pembekalan pada pelaksana kegiatan;
 - e) Penyiapan dokumen administrasi;
 - f) Penyediaan tenaga kerja dan bahan material
2. Pelaporan dan Pertanggungjawaban
- a) Kepala desa menyusun laporan kegiatan pembangunan desa yang telah berlangsung
 - b) Kepala desa menyajikan laporan sesuai format (realisasi biaya, foto kegiatan infrastruktur desa, foto yang memperlihatkan orang sedang bekerja, foto yang memperlihatkan peran serta masyarakat, dan foto yang memperlihatkan pembayaran upah secara langsung kepada tenaga kerja)
 - c) Kepala desa menyampaikan laporan sesuai dengan jenis kegiatan dan tahapan penyaluran dana kegiatan
 - d) Kepala desa menyampaikan laporan berdasarkan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana dan tahapan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - e) Kepala desa mengadakan musyawarah kembali terkait pelaporan mengenai pembangunan yang telah berlangsung
 - f) Kepala desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa tentang laporan pelaksanaan pembangunan desa.
 - g) Kepala desa mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah desa
 - h) Kepala desa mengoordinasikan pelaksana kegiatan untuk melakukan perbaikan hasil kegiatan berdasarkan berita acara hasil kesepakatan musyawarah desa.

2.4. Sumber Pembiayaan Pembangunan Desa

Timbulnya otonomi lokal mendukung pemerintah desa untuk lebih memberdayakan masyarakat dan memaksimalkan sumberdaya yang ada baik itu sumberdaya dari desa sendiri maupun dari luar. Termasuk dalam pengelolaan keuangan juga menjadi kewenangan pemerintah desa. Menurut Permendagri No. 37/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Hak dan kewajiban tersebut berupa pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa yang baik.

Semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ pengeluaran yang akan diterima kembali disebut sebagai Pembiayaan Desa baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Tetapi berdasarkan perhitungan APBDes Tahun 2016 untuk pos pembiayaan tidak ada transaksi atau kegiatan yang terjadi. Sesuai dengan Permendagri Nomor 37/2007 pembiayaan desa sebagaimana dimaksud terdiri dari: a) penerimaan pembiayaan, mencakup Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Transfer, Bantuan Provinsi, Bantuan Kabupaten, dan b) pengeluaran pembiayaan, mencakup menyelenggarakan pemerintahan desa, Pembangunan desa, Pembinaan desa, Pemberdayaan masyarakat.

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa bahwa Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya yang

perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.,

Pembiayaan terdiri dari:

1. Penerimaan pembiayaan mencakup:

- a) Sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya
- b) Mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan ini bisa dikucurkan dari desa asli, penerimaan dari alokasi dana desa, dibanjiri dari pendapatan lain, kelebihan dari pembiayaan, menghemat pengeluaran, sisa dana untuk kegiatan, dll. Selain itu, sisa silpa lebih banyak dari tahun sebelumnya. Silpa akan menambah defisit anggaran ketika realisasi pendapatan kurang dari realisasi pengeluaran, kegiatan tindak lanjut dana dan tugas-tugas lain yang tidak selesai pada akhir tahun fiskal.
- c) Pengeluaran dana digunakan untuk menganggarkan pengeluaran dana dari rekening dana ke rekening kas desa untuk tahun fiskal berjalan. Cadangan tidak boleh digunakan untuk kegiatan selain yang sebelumnya diatur dalam peraturan desa tentang pembentukan cadangan.
- d) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- e) Penerimaan pinjaman

2. Pengeluaran pembiayaan mencakup:

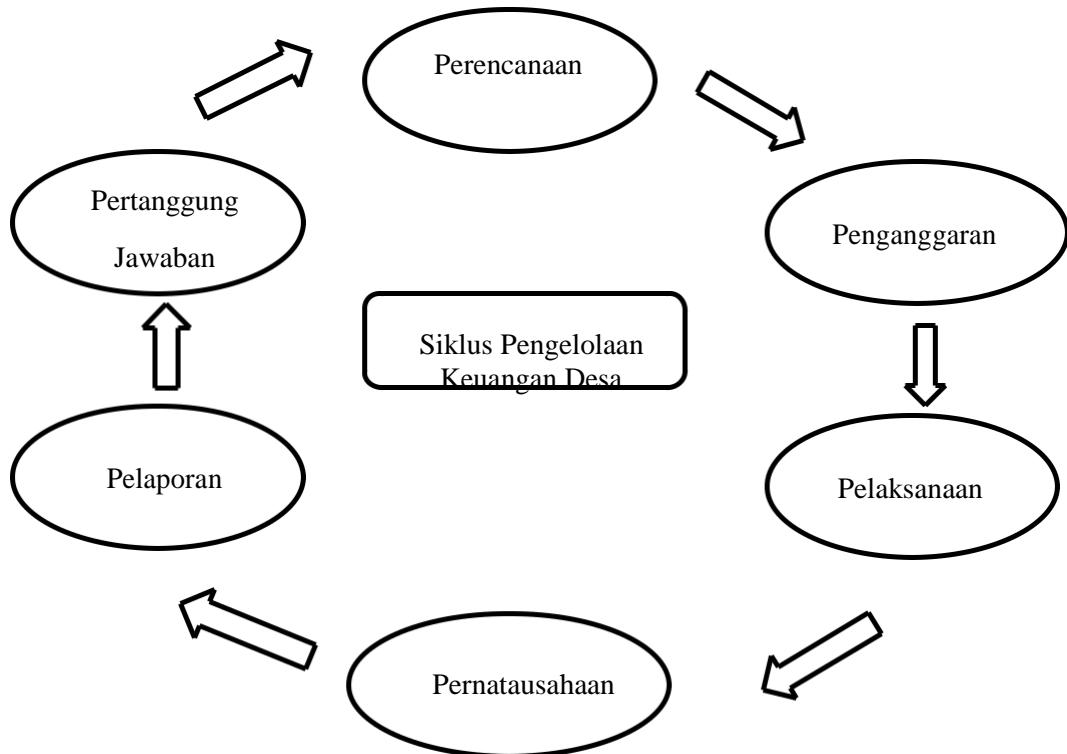
- a) Terjadinya penambahan dana cadangan dimaksudkan untuk pembiayaan yang ditetapkan dalam pembentukan dana cadangan. Dana tersebut

ditetapkan dalam peraturan desa dan tidak dapat dibebankan dalam 1 tahun anggaran.

- b) Penyertaan modal desa. Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dapat dimanfaatkan oleh pemerintah desa untuk berinvestasi kerja sama dengan badan swasta lain. Penyertaan modal ini dilakukan oleh kepala desa dan disetujui BPD setelah ada ketetapan peraturan desa. pengeluaran ini masuk pada pengeluaran kekayaan pemerintah desa yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- c) Pembayaran hutang. Pembayaran kewajiban desa yang timbul akibat pinjaman desa pada pihak lain.

Siklus pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa diatur oleh Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa yakni terdapat. Serta yang menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa tersebut adalah kepala desa, seperti di gambarkan berikut ini :

Gambar 1 Siklus pengelolaan keuangan desa



Yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses pembangunan pada semua desa yakni adanya kepastian dana untuk pembiayaan. Desa memiliki beberapa sumber pendapatan yang nantinya dimanfaatkan untuk kelangsungan pembangunan desa, meliputi infrastruktur, pemberdayaan, pembinaan kemasyarakatan desa, biaya operasional desa, dan lain sebagainya. Menurut UU No. 6/2014 tentang desa pasal 72 dan ayat 1 menyatakan bahwa, sumber-sumber pendapatan desa dibagi dalam tujuh bagian, yakni: 1) Pendapatan Asli Desa, 2) Alokasi APBN (dana desa), 3) bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daera (PDRD) kabupaten/kota, 4) Alokasi Dana Desa (ADD), 5) bantuan keuangan dari APBD Prov/Kab/Kota, 6) hibah dan sumbangan pihak ketiga, 7) lain- lain pendapatan yang sah. Namun terdapat perbedan antara Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

2.5. Alokasi Dana Desa

Salah satu yang menjadi sumber pendapatan desa adalah alokasi dana desa (ADD). Menurut Muntahanah dan Murdijaningsih (2014:149), ADD sendiri mengandung makna bahwa kewenangan yang dimiliki oleh desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa. Pemerintah desa memiliki sumber- sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut,. Salah satu hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan di setiap desa adalah adanya kepastian keuangan untuk pembiayaannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No.6/2014 tentang desa, Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Kemudian dijelaskan juga bahwa, ADD paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Jadi, ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang

diterima oleh kabupaten. Adapun tujuan dari ADD dalam Permendagri No. 20/2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa:

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
4. Meningkatkan pengalaman nilai- nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;

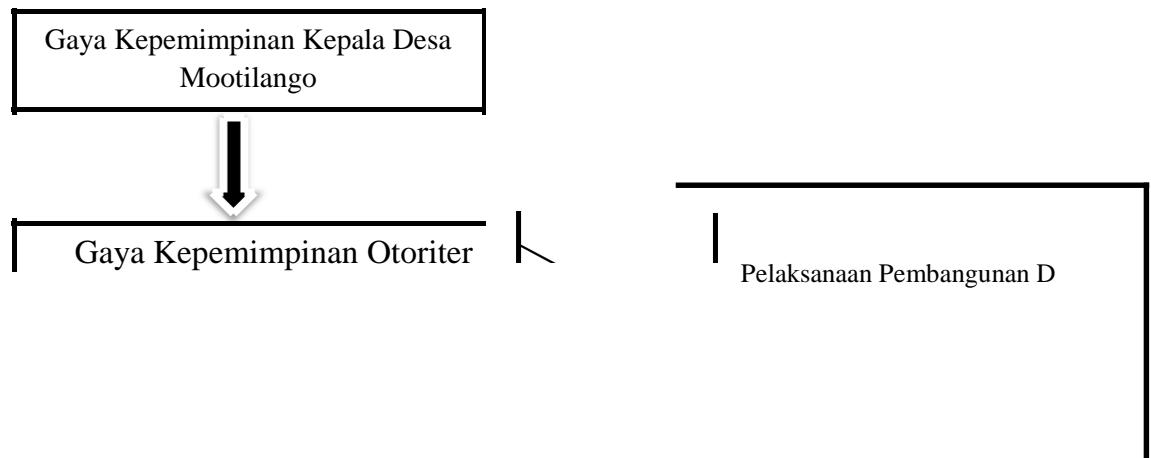
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

2.6. Kerangka Konseptual

Setiap desa memiliki seorang pemimpin pemerintah formal yang disebut kepala desa. Dalam pelaksanaan program pembangunan, kepala desa berperan mulai dari persiapan hingga pada pelaporan dan pertanggungjawaban. Kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan desa, diantaranya melaksanakan pembangunan desanya dengan kewenangan yang dimilikinya yang telah diatur oleh negara dalam UU No.6/2014 tentang Desa. Pelaksanaan tugas kepala desa sebagai seorang pemimpin pemerintah formal dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktornya ialah gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ialah teknik yang ada pada setiap pemimpin dalam memberi pengaruh terhadap anggota dalam mewujudkan tujuan yang diinginkan. Pembiayaan dalam program pembangunan di desa tentu berdasarkan pengaruh kepala desa itu sendiri sebagai pemimpin paling berpengaruh di desa. Sebagai pemimpin, kepala desa memiliki ciri khas gaya kepemimpinan yang nantinya berpengaruh dalam program pembangunan desa.

Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini di gambarkan seperti dibawah ini :

Gambar 2
Kerangka Konseptual



Sumber : Hasibuan (2007:170)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Objek dan Waktu Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian dan kerangka konseptual yang diuraikan pada bab sebelumnya, maka yang menjadi objek penelitian adalah mengenai Gaya Kepemimpinan Kepala Desa serta Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Yang Bersumber dari ADD. Penelitian ini direncanakan dilakukan selama 3 (tiga) bulan bertempat di Kantor Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato.

3.2. Desain Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis memilih jenis penelitian analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan angka-angka dan kata-kata atau kalimat dan gambar dengan memakai sampel dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok.

Dalam penelitian ini penulis cenderung menggunakan teknik survei langsung kepada responden yang telah ditentukan. Metode dilakukan dengan cara mengunjungi objek dan subjek penelitian untuk selanjutnya dilakukan pembagian dan penyebaran kuesioner atau daftar pertanyaan yang telah disusun berdasarkan fokus masalah.

3.3. Operasional Variabel Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual maka yang menjadi operasionalisasi variabel penelitian adalah di uraikan dalam matriks sebagai berikut:

Tabel 3.1 : Matriks Operasionalisasi Variabel Penelitian

VARIABEL	INDIKATOR	SKALA
Gaya Kepemimpinan Otoriter (X1)	1. Kekuasaan dan paksaan mutlak 2. Perintah langsung 3. Penerimaan kritik dan saran	Ordinal
Gaya Kepemimpinan Partisipatif (X2)	1. Sikap persuasif 2. Menciptakan kerja sama 3. Motivasi inspirasional	Ordinal
Gaya Kepemimpinan Delegatif (X3)	1. Pendeklegasian 2. Pengambilan keputusan berada pada bawahan 3. Pekerjaan tanpa pengawasan	Ordinal
Pelaksanaan Pembangunan Yang Bersumber dari ADD (Y)	1. Tahap Persiapan 2. Tahap pelaksanaan 3. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban	Ordinal

Sumber : Malayu Hasibuan (2007:170)

Dalam melakukan test dari masing-masing variabel akan diukur dengan menggunakan skala likert. Kuisioner disusun dengan menyiapkan 5 (lima) pilihan yakni :Sanga tSetuju, Setuju, Ragu-ragu, Tidak Setuju, Sangat Tidak Setuju. Setiap pilihan akan diberikan bobot nilai yang berbeda seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2 : Bobot Nilai Variabel

Pilihan	Bobot
Sangat Setuju /Selalu	5
Setuju /Sering	4
Ragu-ragu/Kadang-kadang	3
Tidak Setuju /Jarang	2
Sangat Tidak Setuju /TidakPernah	1

Sumber : Sugiyono (2018 : 55)

3.4. Populasi dan Sampel

3.4.1. Populasi

Menurut (Sugiyono,2013:57), definisi populasi adalah wilayah yang terdiri dari subjek dan objek yang di generalisir dengan karakteristik tertentu yang bersifat kuantitas yang ditetapkan untuk dipelajari peneliti, kemudian ditarik kesimpulannya”. Sehingga populasi dalam penelitian ini adalah terdiri dari Aparat desa, BPD, Kepala-kepala dusun, dan tokoh-tokoh masyarakat Desa Mootilango.

3.4.2. Sampel

Sugiyono (2018:81) menyatakan bahwa represenatse dari populasi dijadikan sampel yang dianggap mewakilinya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik penarikan sampel Purposive Sampling yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan yang di tentukan peneliti bahwa populasi tersebut di anggap mampu dan mengetahui secara persis mengenai pokok

permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini. Sehingga sampel yang di jadikan responden dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Aparat Desa Mootilango	8 Orang
2. BPD Mekarti Jaya	7 Orang
3. Kepala Dusun	3 Orang
4. Tokoh Masyarakat	<u>20 Orang</u>
Total	38 Orang

3.5.Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari para responden tempat penelitian dengan sumber datanya adalah kuesioner.
2. Data Sekunder, yaitu data yang sudah dipublikasikan oleh pihak lain, dan sumber datanya adalah berupa dokumen-dokumen dan laporan tertulis yang ada kaitannya dengan objek penelitian, dan lain-lain.

3.6. Metode Pengumpulan data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengambilan data sebagai berikut :

1. Observasi adalah melihat secara langsung serta mencari informasi yang ada kaitannya dengan penelitian.
2. Kuesioner adalah memberikan daftar pertanyaan kepada setiap responden sebagai alat pengumpul data.

3.7. Prosedur Penelitian

Banyak cara yang dapat dilakukan dalam mendapatkan data yang objektif, keberadaan instrument sebagai alat pokok dalam pengumpulan data yang kemudian hasilnya memenuhi standar kevalidan dan handal atau tidak dapat diganggu gugat serta sahih dan tidak diragukan karena harus melalui proses uji secara statistic

3.7.1 Uji Validitas

Menurut Arikunto (2001:219) Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau keahlian suatu instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang diukur. Uji Validitas dilakukan dengan mengkorelasikan masing-masing pernyataan dengan jumlah skor untuk masing-masing variabel. Selanjutnya dalam memberikan interpretasi terhadap koefisien korelasi. Menurut Masrun, yang dikutip Sugiyono (2018:106) menyatakan pernyataan yang memiliki hubungan positif atau korelasi skoring (skor total) dan korelasinya tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. Untuk pengujian menggunakan rumus angka kasar sebagai berikut :

$$r_{XY} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{((n \sum X^2) - (\sum X)^2)((n \sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

dimana :

r	=	Koefisien Korelasi
X	=	Variabe bebas (Independent)
Y	=	Variabel terikat (Dependent)
n	=	Banyaknya sampel

Selanjutnya dihitung dengan uji t dengan rumus:

$$t = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$t_{\text{hitung}} = \frac{n}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana:

t = Nilai t hitung

n = Jumlah responden

r = Koefisien korelasi hasil r hitung

Selanjutnya angka korelasi yang diperoleh berdasarkan hasil perhitungan di transformasi kenilai t – student dan di bandingkan dengan tabel – t pada derajat bebas ($n-2$), taraf signifikansi yang dipilih. Bila nilai t yang diperoleh berdasarkan perhitungan nilainya lebih besar dari nilai t tabel maka pertanyaan dikatakan valid, dan bila nilai t dibawah atau sama dengan nilai t tabel maka pertanyaan dikatakan tidak valid. Sedangkan untuk mengetahui tingkat validitas besarnya pengaruh masing-masing variabel atau besarnya koefisien korelasinya dengan menggunakan interpretasi koefisien korelasi, seperti pada tabel 3.3, berikut :

Tabel 3.3
Interpretasi koefisien korelasi

R	Keterangan
$0,000 < 0,199$	Korelasi sangat rendah
$0,200 < 0,399$	Korelasi rendah
$0,400 < 0,699$	Korelasi sedang
$0,700 < 0,899$	Korelasi Tinggi
$0,900 < 1,000$	Korelasi sangat tinggi

Sumber : Sugiyono (2018:106)

3.7.2 UjiReliabilitas

Pengujian reliabilitas atau reliabilitas dimaksudkan untuk mengukur keandalan perangkat pengukuran dengan memberikan responden inti yang relatif sama, bahkan jika mereka melakukan pada waktu yang berbeda.. Uji dilakukan menggunakan teknik belah dua dari *Spearman Brown*, yang langkah-langkah kerjanya sebagai berikut :

1. Membagi pernyataan-pernyataan menjadi dua belahan
2. Skor untuk masing-masing pernyataan pada tiap belahan dijumlahkan, sehingga menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden.
3. Mengkorelasikan skor total belahan pertama dengan belahan kedua, dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment*.

Angka korelasi yang diperoleh adalah angka korelasi dari alat pengukur yang dibelah (split-half), maka angka korelasi yang lebih rendah dari pada angka yang diperoleh jika alat ukur itu tidak dibelah, seperti pada teknik *test-retest*.

$$r_i = \frac{2 r_b}{1 + r_b}$$

dimana:

r_i = Reliabilitas internal seluruh instrumen atau pernyataan

r_b = Korelasi *product moment* antara belahan pertama dan kedua

Reliabel setiap pernyataan akan ditunjukkan dengan hasil r_i positif dan r hitung $> r$ tabel, berarti seluruh item pernyataan adalah reliabel/handal.

3.7.3. Konversi data

Proses transformasi data dari skala pengukuran ordinal ke skala pengukuran interval dapat dilakukan melalui suatu metode transformasi data yang dikenal *method of successive interval*, (Hays: 1976:39-42, dalam Riduwan 2009:30). Pada umumnya jawaban responden yang diukur dengan menggunakan skala likert (*Lykert scale*) diadakan scoring yakni pemberian nilai numerikal 1,2,3,4 dan 5, setiap skor yang diperoleh akan memiliki tingkat pengukuran ordinal. Nilai numerikal tersebut dianggap sebagai objek dan selanjutnya melalui proses transformasi ditempatkan kedalam interval, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Untuk setiap pertanyaan Hitung frekuensi (f) setiap skor (1 sampai dengan 5) dari responden yang memberikan tanggapannya
2. Hitung proporsi dengan membagi jumlah f (frekuensi) dengan jumlah n sampel
3. Tentukan proporsi kumulatif dengan menjumlahkan proporsi secara berurutan setiap responden
4. Proporsi kumulatif dianggap mengikuti distribusi normal baku. Selanjutnya, hitung nilai Z berdasarkan pada proporsi kumulatif tadi
5. Dari nilai Z yang diketahui tersebut, tentukan nilai density-nya dengan menggunakan tabel 4 (*ordinates Y the Normal Curve a Z*).
6. Menghitung SV untuk masing-masing pilihan dengan rumus :

$$SV (scale value) = \frac{(density at lower limit) - density at upper limit)}{(area under upper limit) - (density under lower limit)}$$

Keterangan :

density at lower limit : Kepadatan batas bawah

<i>density at upper limit</i>	: Kepadatan batas atas
<i>area under upper limit</i>	: Daerah dibawah batas atas
<i>area under upper limit</i>	: Daerah dibawah batas bawah

3.8. Metode analisis

Dalam menganalisa dan menguji Pengaruh Gaya kepemimpinan Kepala Desa terhadap Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa Yang Bersumber dari ADD, di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupatehn Pohuwato, maka penulis melakukan perhitungan dengan menggunakan rumus regresi berganda. Dan selanjutnya dilakukan uji signifikan dengan menggunakan uji t. Dimana variabel X1 adalah kepemimpinan otoriter, Variabel X2 kepemimpinan Partisipatif, dan Variabel X3 kepemimpinan delegatif serta variabel Y adalah pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari ADD. dengan rumus Regresi berganda, sebagai berikut :

1. Regresi berganda

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \epsilon$$

dimana :

Y	= Pelaksanaan Pembangunan
a	= Konstanta
b ₁ , b ₂ , b ₃	= Koefisien Regresi
X ₁	= Otoriter
X ₂	= Partisipatif
X ₃	= Delegatif
ϵ	= Faktor Pengganggu

2. Rumus Korelasi *Person Product Moment*

$$r_{XY} = \frac{n\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{((n\sum X^2) - (\sum X)^2)((n\sum Y^2) - (\sum Y)^2)}}$$

dimana :

r_{xy}	=	Koefisien Korelasi
X	=	Variabe bebas (Independent)
Y	=	Variabel terikat (Dependent)
n	=	Banyaknya sampel

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1. Sejarah Singkat Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa

Pada tahun 2008 Desa Mootilango telah terbentuk adalah pecahan /pemekaran dari Desa Mekar Jaya yang pada tahun bersamaan itu pula telah terbentuk kabupaten pohuwato yang tertuang dalam undang-undang nomor 6 tahun 2003 tentang pembantukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten

Pohuwato. Pembentukan Desa pada tahun 2008 di beri nama Desa Mootilango, seiring dengan pemekaran Desa Buntulia Jaya dan Desa Padengo.

1) Aspek Geografi dan Demografi

Desa Mootilango termasuk salah satu Desa yang berada di Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo. Dengan mempunyai luas wilayah \pm 4,48 Ha, dan mempunyai 4 Dusun, yang penduduknya mayoritas agama islam dan bermata pencaharian sebagai Petani dan Nelayan.

Desa Mootilango salah satu Desa yang jauh dari pusat kota Kabupaten dengan jarak jauh sekitar \pm 15 km, dengan keadaan wilayah yang terletak di kawasan pesisir teluk tomini dan juga di jalur Trans Sulawesi dengan topografi dataran rendah, persawahan dan pertambakan.

2) Aspek Demografi

Berdasarkan Data Administrasi Pemerintah Kabupaten Pohuwato Desa Mootilango di mekarkan pada tahun 2008 dari Desa Mekar Jaya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2008. Tentang Pembentukan Desa di Kabupaten Pohuwato.

Pada tahun 2008 desa mootilango telah terbentuk adalah pecahan/pemekaran dari desa Mekar Jaya yang pada tahun bersamaan itu pula telah terbentuk Kabupaten Pohuwato yang tertuang dalam undang – undang nomor 6 tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato. Pembentukan Desa pada tahun 2008 diberi nama Desa Mootilango, seiring dengan pemekaran Desa Buntulia jaya dan Desa Padengo.

Pada saat ini Desa Mootilango telah dibentuk menjadi 4 Dusun yaitu :

1. Dusun Beringin
2. Dusun Tuluwa
3. Dusun Bungango
4. Dusun UPT

Dalam pembahasan pemekaran desa dibahas melalui musyawarah Pemerintah Desa, BPD, LPM, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat dan elemen masyarakat.

Dalam pembahasan tersebut dibahas Dusun – dusun yang ada di wilayah desa mootilango. Adapun alasan desa ini di namakan Desa Mootilango diambil dengan semangat masyarakat agar Desa Mootilango menjadi desa yang bersinar di kabupaten pohuwato.

Luas wilayah : 4,48 Km dan penduduknya terdiri dari laki – laki = 521 jiwa sedangkan perempuan terdiri dari = 525 jiwa. Jumlah penduduk keseluruhan adalah (Lk/Pr) = 1046 jiwa dan jumlah kepala keluarga adalah = 294 KK.

Sampai sekarang desa Mootilango sudah di pimpin oleh 4 Kepala Desa yaitu:

1. MOHAMAD KALAH A S.Pdi
2. RAHIM GOBEL,Dari 2009 Sampai 2015
3. ZAKIR USMAN,Dari 2015 Sampai 2016
4. RAHIM GOBEL,Dari 2016 Sampai sekarang

Demikian Sejarah dan asal usul Desa hingga terbentuknya Desa Mootilango sampai sekarang,terima-kasih.

- 3) Luas dan batas wilayah administrasi

Luas Wilayah : 4,48 km dengan batas-batas wilayah :

Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Mekar Jaya

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Teluk Tomini

Sebelah Barat : berbatasan dengan Manawa

Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Duhuadaa dan Buntulia

Desa Mootilango terbagi dalam 4 Dusun yaitu : Dusun Beringin, Dusun

4) Letak dan kondisi geografis antara lain terdiri dari:

a. Posisi astronomis

Garis Bujur : 121,88908 BT

Lintang : 00,47962 LU/LS ++)

b. Posisi geostrategis

Desa Mootilango mempunyai Luas Wilayah \pm 4,48 Ha yang terbagi 4 Dusun masing-masing adalah Dusun Beringin, Dusun Tuluwa, Dusun Bungango, Dusun UPT.

c. Potensi pengembangan wilayah

Dengan adanya lahan produktif bidang pertanian, bidang perkebunan dan bidang perikanan yang menjadi prioritas masyarakat Desa Mootilango dapat meningkatkan hasil dan potensi masyarakat dalam hal pengembangan wilayah pertanian, perkebunan dan perikanan.

4.1.2. Visi dan Misi Desa Mootilango Kecamatan Duhuadaa

Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi

menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Sedangkan misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi atau organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi tersebut. Adapun visi dan misi desa mootilango adalah sebagai berikut :

1) Visi

Visi desa mootilango kecamatan duhiadaa adalah : Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Handal Berkualitas, Inovatif Dan Berimplementasikan Iptak (Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi) Berdasarkan Imtak (Iman Dan Taqwa) Guna Menopang Sumber Daya Alam Menuju Desa Mootilango Yang Madani.

Dalam Visi Desa Mootilango terkandung kerangka rencana Pembangunan yang substansinya meliputi : Upaya pengembangan terhadap sumber daya manusia menuju terciptanya tenaga-tenaga handal dan berkualitas yang berbasis IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi), berlandaskan IMTAQ (Iman dan Taqwa) sehingga mampu melahirkan gagasan, ide dan inovasi-inovasi brilian dalam rangka mengoptimalkan potensi sumber daya alam demi dan untuk mewujudkan Desa Mootilango yang MADANI.

Kata MADANI disini adalah bentuk singkatan dari 5 (Lima) kata yakni : MAJU, ASRI, DEMOKRATIS, AGAMIS dan HARMONIS, di mana penggabungan dari kelima kata ini kemudian menjadi kata kunci dari Visi Desa Mootilango yang dapat diuraikan sebagai berikut :

- MAJU adalah indikator pencapaian peningkatan bangunan Desa secara umum, baik di tinjau dari aspek fisik maupun sosial ekonomi.

- ASRI merupakan gambaran suasana dan kondisi Desa yang tendensinya lebih kepada lingkungan yang menyusung motto 3T : Tertata, Terawat, dan Terjaga.
- DEMOKRATIS merupakan cerminan kehidupan sosial masyarakat yang berkaitan dengan hak-haknya dalam hal permusyawaratan yang mengedepankan prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi.
- AGAMIS adalah gambaran kondisi masyarakat lebih kepada sisi spiritual yang dalam hal ini terindikasi pada peningkatan pelaksanaan Ibadah dan atau kegiatan keagamaan.
- HARMONIS adalah gambaran situasi hubungan interaksi yang aman, damai, dan kondusif, baik antara masyarakat tanpa dibatasi oleh suku, agama, ras, dan etnis.

Untuk menegaskan konsistensi dalam mempertanggung jawabkan komitmen membangun dan demi menjalin sinergitas antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), maka penjelasan Visi Desa dengan RPJMD Kabupaten Pohuwato.

2) Misi

Untuk mendukung visi tersebut diatas, maka yang menjadi misi desa mootilango kecamatan duhiadaa adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Pengembangan Usaha Masyarakat Yang Berkelinambungan
2. Memberi Peluang Kepada Masyarakat Dan Pemuda Yang Berkualitas Berbakat Serta Mempunyai Keahlian Untuk Menumbuh Kembangkan Ilmu Yang Dimiliki Oleh Individu Masing – Masing

3. Mengembangkan /Membina Kelompok Kerja Masyarakat Sesuai Kebutuhan Kelompok Itu Sendiri
4. Mengembangkan Dan Memfasilitasi Keagamaan Dan Memupuk Budaya Dan Adat Istiadat Yang Menjadi Ciri Khas Daerah Kita Sehingga Terwujudnya Desa Mootilango Yang Madani
5. Meningkatkan dan Menopang Ekonomi Masyarakat Tidak Mampu/Berpenghasilan Rendah

Penjelasan Misi

1. Secara kontinyu, menciptakan dan mendorong berkembangnya usaha masyarakat
2. Memberikan kesempatan dan membuka ruang kepada masyarakat dan pemuda yang memiliki keahlian dan bakat untuk mengaplikasikan bakat dan keahliannya dalam kehidupan bermasyarakat di Desa.
3. Mendorong pengembangan kepada kelompok kerja masyarakat dengan melakukan pendampingan teknis sambil melakukan penguatan terhadap kelompok struktur maupun infrastruktur.
4. Melakukan upaya pengembangan dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang mengandung nilai-nilai religi, sosial, adat dan budaya untuk melestarikan eksistensi dari ciri khas Negeri Serambi Madina. Mewujudkan Desa Mootilango yang MADANI (Maju, Asri, Demokratis, Agamis, dan Harmonis) secara utuh dan menyeluruh, terus mengacu pada Asas Pembangunan yakni Adil dalam Kemakmuran, dan Makmur dalam Keadilan.

5. Melakukan penyelarasan arah kebijakan Pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati.

4.1.3. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Mootilango

Tabel-1 : Struktur Pemerintahan Desa

No	NAMA	JABATAN	UMUR	MASA JABATAN	PEND
1	Rahim Gobel	Kades	46 Thn	3 Bulan	SMA
2	Sri Ningsi Sulistiyo	Sekdes	31 Thn	1 Tahun	SMA
3	Ningsi Poliamma	Kaur Pemerintahan	27 Thn	1 Tahun	SMK
4	Lilis Matolodula,SE	Kaur Pembangunan	27 Thn	1 Tahun	S1
5	Firda Adam	Kaur Umur	27 Thn	6 Tahun	SMA
6	Misna Monoarfa	Bendahara Desa	38 Thn	8 Tahun	SMA
7	Non Umar	Kadus Beringin	44 Thn	1 Tahun	SMA
8	Abd. Wahab Apajulu	Kadus Tuluwa	37 Thn	1 Tahun	SMA
9	Rahman Hanapi	Kadus Bungango	22 Thn	7 Bulan	SMA
10	Suharno Ibrahim Due	Kadus UPT	24 Thn	1 Tahun	SMA
11	Indrawati Pakaya,S.Kom	Operator Komputer	23 Thn	1 Tahun	S1
12	Fitri Adam,S.Kom	Operator Profil	24 Thn	1 Tahun	S1
13	Misrawati Inisa	Unsur Pelaksana	49 Thn	1 Tahun	SMEA

Sumber : RPJMDes Mootilango 2019

4.1.4. Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Desa

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2006 dan PERDA nomor 5 tahun 2008 disebutkan bahwa Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur pelaksana dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dalam pelaksanaannya sehari- hari semua kegiatan perencanaan dikoordinasikan dengan pihak Kecamatan, dan apabila perlu dengan pihak Pemerintah Kabupaten. Dalam hal ini sesuai kewenanganya jajaran pemerintah Desa menyelenggarakan pelaksanaan program dari semua instansi yang terkait dalam menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan pelaksanaannya. Berikut diterangkan data Perangkat sesuai tugas dan jabatanya :

- a. **RAHIM GOBEL**, Jabatan Kepala Desa Mootilango. Tugas dan kewewenangnya adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangannya, menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan dan melaksanakan tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten .Dan sebagainya.
- b. **SRI NINGSI SULISTIYO**, Jabatan Sekretaris Desa Mootilango. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah menjalankan administrasi Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan didesa serta memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan Organisasi Pemerintah Desa. Dan lain sebagainya.
- c. **NINGSI POLIAMA**, Jabatan KAUR Pemerintahan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah penyusunan rencana kegiatan, menjabarkan, koordinator, pengumpulan perintah Kepala Desa serta mendistribusikan tugas tersebut pada masyarakat. Dan lain sebagainya.
- d. **LILIS MATOLODULA, SE**, Jabatan KAUR Pembangunan. Sebagian tugas dan wewenangnya adalah Koordinator pelaksanaan tugas dalam unit kerja, antar unit kerja dengan lembaga kemasyarakatan yang terkait baik secara Formal ataupun informal guna memperoleh kesatuan pendapat. Dan lain sebagainya.
- e. **FIRDA ADAM**, Jabatan KAUR Umum. Tugas dan sebagian wewenangnya adalah pengumpulan administrasi kepegawaian, penyelenggaraan rapat-

rapat, tata usaha desa, surat menyurat, kearsipan, penyajian data dan kepustakaan serta dokumentasi. Dan lain sebagainya.

4.1.5. Deskripsi Responden

Kuisisioner yang disebarluaskan dalam penelitian ini berjumlah 38 kuisioner dengan penelitian yaitu Aparat Desa Mootilango, BPD, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa kabupaten pohuwato. Kuisioner yang kembali juga berjumlah 38 kuisioner. Jadi *responserate* dalam penelitian ini ialah 100 % artinya semua jawaban lengkap dan layak digunakan untuk analisa. Berikut akan dipaparkan karakteristik responden.

Adapun karakteristik responden Secara umum berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan terakhir, dan pekerjaan dapat diuraikan berdasarkan tabel di bawah ini :

Tabel 2 : Persentase Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase%
1	Laki-Laki	26	68.4
2	Perempuan	12	31.6
Total		38	100

Sumber Data :Olah Data Kuesioner (2019)

tabel diatas menunjukkan dari 38 yang ditetapkan sampel pada penelitian ini, 26 orang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 68.4%. Sedangkan yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 12 dengan persentase 31.6%. Sehingga dapat disimpulkan dimana jumlah responden laki-laki lebih mendominasi dari responden berjenis kelamin perempuan. Hal ini disebabkan karena peneliti lebih memprioritaskan responden tokoh masyarakat dari kalangan laki-laki yang mengetahui betul tentang gaya kepemimpinan kepala desa terutama dalam hal

pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa di desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa.

Tabel 3 : Persentase Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi	Presentase%
1	20-30 Tahun	20	52.6
2	31-40 Tahun	5	13.2
3	41-50 Tahun	6	15.8
4	51 Tahun keatas	7	18.4
Total		38	100

Sumber Data :Olah Data Kuesioner (2019)

Berdasarkan data pada tabel diatas menunjukkan bahwa responden yang memiliki kelompok usia 20-30 tahun berjumlah 20 orang atau 52.6%, kelompok usia 31-40 tahun berjumlah 5 orang atau 13.2%, kelompok usia 41-50 tahun berjumlah 6 orang atau 15.8%. sedangkan kelompok usia 51 tahun ke atas berjumlah 7 orang atau 18.4 %. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa responden dengan kelompok umur yang terbanyak adalah didominasi antara 20 – 30 tahun.

Tabel 4 : Persentase Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	Presentase%
1	SD	7	18.4
2	SLTP	2	5.35.3
3	SMA/ Sederajat	21	55.55.3
4	Strata 1(S1)	8	21.21.0
Total		38	100

Sumber Data :Olah Data Kuesioner (2019)

Sumber Data :Olah Data Kuesioner (2019)

Berdasarkan data pada tabel diatas bahwa terdapat 7 orang yang berpendidikan SD dengan persentase 18.4%, 2 orang yang berpendidikan SLTP

dengan persentase 5.3%, kemudian 21 orang yang berpendidikan SMA/Sederajat, dengan persentase 55.3%. Sedangkan responden yang berpendidikan S1 atau Sarjana sebanyak 8 orang dengan persentase 21.0%. Hal ini menunjukan bahwa banyak responden berpendidikan SMA/Sederajat. Adapun terdapat 7 orang yang berpendidikan SD adalah merupakan tokoh-tokoh masyarakat desa mootilango kecamatan duhiadaa, yang dipilih oleh peneliti karena dianggap memahami tentang persoalan kemasyarakatan, pemerintahan desa dan pembangunan desa.

4.2. Interpretasi Data Hasil Penelitian

4.2.1. HASIL UJI VALIDITAS DAN UJI RELIABILITAS

Uji validitas dan kredibilitas kuesioner atau alat penelitian yang bertujuan menguji kelayakan psikometrik kuesioner. Survei yang valid dan andal memastikan bahwa data yang diperoleh tidak bias.

Uji validitas dilakukan pada setiap item pernyataan dalam survei. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi product moment antara skor item dan skor total (skor peralatan). Item pernyataan valid jika item memiliki korelasi total item yang signifikan ($r_{yx} > r_{tabel}$). Dalam tes validitas ini, hingga 38 responden digunakan, sehingga $r_{tabel} = 0,320$ diperoleh pada tingkat signifikansi 5% pada Tabel r.

Keahlian daftar pertanyaan penelitian dilakukan dengan menggunakan metode alpha Cronbach. Menurut Arikunto (2002: 171), "Jika nilai alfa Cronbach lebih besar dari 0,5, perangkat dikatakan reliabel / andal dan survei dinyatakan reliabel.

HASIL DARI KEDUA PENGUJIAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA

TABEL BERIKUT:

TABEL-5 : HASIL UJI VALIDITAS

VARIABEL	INDIKATOR	R_HITUNG	KET
OTORITER (X1)	ITEM 1	0.414	VALID
	ITEM 2	0.420	VALID
	ITEM 3	0.403	VALID
	ITEM 4	0.450	VALID
	ITEM 5	0.490	VALID
	ITEM 6	0.492	VALID
VARIABEL	INDIKATOR	R_HITUNG	KET
PARTISIPATIF (X2)	ITEM 1	0.416	VALID
	ITEM 2	0.481	VALID
	ITEM 3	0.644	VALID
	ITEM 4	0.680	VALID
	ITEM 5	0.674	VALID
	ITEM 6	0.544	VALID
VARIABEL	INDIKATOR	R_HITUNG	KET
DELEGATIF (X3)	ITEM 1	0.359	VALID
	ITEM 2	0.352	VALID
	ITEM 3	0.332	VALID
	ITEM 4	0.432	VALID
	ITEM 5	0.374	VALID
	ITEM 6	0.401	VALID
VARIABEL	INDIKATOR	R_HITUNG	KET
PELAKSANAAN	ITEM 1	0.367	VALID

PEMBANGUNAN (Y)	ITEM 2	0.344	VALID
	ITEM 3	0.550	VALID
	ITEM 4	0.714	VALID
	ITEM 5	0.499	VALID
	ITEM 6	0.458	VALID

SUMBER : LAMPIRAN OLAH DATA SPSS 2019

TABEL-6 : HASIL UJI RELIABILITAS

VARIABEL	ALPHA CRONBACH	KETERANGAN
OTORITER (X1)	0.646	RELIABEL
PARTISIPATIF (X2)	0.429	RELIABEL
DELEGATIF (X3)	0.592	RELIABEL
PELAKSANAAN	0.623	RELIABEL
PEMBANGUNAN (Y)		

SUMBER : LAMPIRAN OLAH DATA SPSS 2019

DENGAN HASIL KEDUA PENGUJIAN TERSEBUT KITA DAPAT
MELIHAT BAHWA SETIAP ITEM PERTANYAAN DALAM KUESIONER
VARIABEL INDEPENDEN DAN DEPENDEN MEMILIKI NILAI KORELASI
TOTAL ITEM ATAU FAKTOR SIGNIFIKANSI LEBIH BESAR DARI 0,320.
OLEH KARENA ITU, ANDA DAPAT MENYIMPULKAN BAHWA SETIAP ITEM
PERNYATAAN DALAM SURVEI INI VALID.

4.2.2. Analisis Deskriptif Hasil Penelitian

Penelitian ini akan melihat seberapa besar pengaruh Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Yang bersumber dari ADD Di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa. Masing-masing indikator dari setiap

variabel akan dilakukan pendeskripsi. Langkah awal untuk mendeskripsikan setiap indikator adalah membuat tabel kategori atau skala penilaian untuk masing-masing item pertanyaan. Perhitungan mengenai skala penilaian ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Riduwan (2003:15) dalam menghitung skor masing-masing variabel dan tiap dimensi yang dikalikan dengan skor terendah dengan nilai bobot frekuensi data. Kemudian dilakukan perhitungan masing-masing item pertanyaan untuk mendapatkan penilaian dengan pertama-tama menghitung rentang skalanya. Adapun hasil perhitungannya, yaitu :

$$\text{Bobot terendah} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 1 \times 1 \times 38 = 38$$

$$\text{Bobot tertinggi} \times \text{item} \times \text{jumlah responden} = 5 \times 1 \times 38 = 190$$

$$\text{Rentang skala : } \frac{190 - 38}{5} = 30.4 \text{ (30)}$$

Berdasarkan hasil perhitungan rentang skala tersebut, maka dapat dibuatkan skala penilaian seperti pada tabel 7 berikut ini :

Tabel-7 : Skala Penilaian Jawaban Responden

Range	Kategori
160 - 190	Sangat tinggi
129 - 159	Tinggi
98 - 128	Sedang
67 - 97	Rendah
36 - 66	Sangat Rendah

Sumber : Data Olahan 2019

Selanjutnya setiap jawaban dideskripsikan berdasarkan indikator pertanyaan sebagai berikut :

4.2.2.1. Analisis Deskriptif Gaya Kepemimpinan Otoriter (X1)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel Gaya Kepemimpinan Otoriter (X1) menurut tinjauan responden berdasarkan tabel 8 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel-8: Nilai (Skor) Gaya Kepemimpinan Otoriter (X1)

Bobot	Item 1			Item 2			Item 3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	8	40	21.1	0	0	0	7	35	18.4
4	30	120	78.9	11	44	28.9	26	104	68.4
3	0	0	0	12	36	31.6	5	15	13.2
2	0	0	0	7	14	18.4	0	0	0
1	0	0	0	8	8	21.1	0	0	0
Total	38	160	100	38	102	100	38	154	100

Bobot	Item 4			Item 5			Item 6		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	6	30	15.8	0	0	0	6	30	15.8
4	28	112	73.7	0	0	0	29	116	76.3
3	4	12	10.5	1	3	2.6	3	9	7.9
2	0	0	0	33	66	86.8	0	0	0
1	0	0	0	4	4	10.5	0	0	0
Total	38	154	100	38	73	100	38	155	100

Sumber : Data olahan Kuesioner 2019

Item 1 dari tanggapan responden tentang “Kepala desa sering menggunakan kekuasaan mutlak dalam pelaksanaan kegiatan di desa”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 8 orang dengan skor 40 memberikan jawaban “Sangat Setuju”, dan 30 orang dengan skor 120 menjawab “setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala desa menggunakan kekuasaan mutlak dalam pelaksanaan kegiatan di desa, dengan skor total adalah 160 termasuk kategori “Sangat tinggi”.

Item 2 dari tanggapan responden tentang “Dalam pengambilan keputusan kepala desa tidak pernah melibatkan bawahan”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 11 orang dengan skor 44 memberikan

jawaban “Setuju”, sebanyak 12 orang dengan skor 36 memberikan jawaban “Kurang Setuju”, sebanyak 7 orang dengan skor 14 memberikan jawaban “Tidak Setuju”, dan sebanyak 8 orang dengan skor 8 menjawab “Sangat tidak setuju”. Hal ini menunjukan bahwa Dalam pengambilan keputusan kepala desa sering melibatkan bawahan, dengan skor total adalah 102 termasuk kategori “Sedang”.

Item 3 dari tanggapan responden tentang “Dalam pelaksanaan pembangunan kepala desa selalu memberikan perintah langsung”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 7 orang dengan skor 35 memberikan jawaban “Sangat Setuju”, sebanyak dan 26 orang dengan skor 104 menjawab “setuju”, dan sebanyak 5 orang dengan skor 15 memberikan jawaban “kurang setuju”. Hal ini menunjukan bahwa Dalam pelaksanaan pembangunan kepala desa selalu memberikan perintah langsung kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan, dengan skor total adalah 154 termasuk kategori “tinggi”.

Item 4 dari tanggapan responden tentang “Kepala desa selalu memberikan instruksi atau perintah langsung kepada bawahan”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 6 orang dengan skor 30 memberikan jawaban “Sangat Setuju”, sebanyak dan 28 orang dengan skor 112 menjawab “setuju”, dan sebanyak 4 orang dengan skor 12 memberikan jawaban “kurang setuju”. Hal ini menunjukan bahwa Kepala desa mootilango dalam pelaksanaan pembangunan desa sering memberikan instruksi atau perintah langsung kepada bawahan, dengan skor total adalah 154 termasuk kategori “tinggi”.

Item 5 dari tanggapan responden tentang “Kepala desa tidak mendengarkan saran bawahan”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 1 orang dengan skor 3 memberikan jawaban “Kurang Setuju”, sebanyak 33 orang dengan skor 66 menjawab “tidak setuju”, dan sebanyak 4 orang dengan skor 4 memberikan jawaban “sangat tidak setuju” dengan pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala desa mootilango selalu mendengarkan saran bawahan ketika dalam pelaksanaan pembangunan desa, dengan skor total adalah 73 termasuk kategori “rendah”.

Item 6 dari tanggapan responden tentang “Keputusan kepala desa harus diterima dan dijalankan oleh bawahan”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 6 orang dengan skor 30 memberikan jawaban “Sangat Setuju”, sebanyak 29 orang dengan skor 116 menjawab “setuju”, dan sebanyak 3 orang dengan skor 9 memberikan jawaban “kurang setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa pengambilan keputusan Kepala desa mootilango mengharapkan dapat diterima dan dijalankan oleh bawahan, dengan skor total adalah 155 termasuk kategori “tinggi”.

4.2.2.2. Analisis Deskriptif Gaya Kepemimpinan Partisipatif (X2)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel Gaya Kepemimpinan Partisipatif (X2) menurut tinjauan responden berdasarkan tabel 9 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel-9: Nilai (Skor) Gaya Kepemimpinan Partisipatif (X2)

2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	38	161	100	38	157	100	38	161	100

Bobot	Item 4			Item 5			Item 6		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	6	30	15.8	12	60	31.6	8	40	21.1
4	28	112	73.7	23	92	60.5	26	104	68.4
3	4	12	10.5	3	9	7.9	4	12	10.5
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	38	154	100	38	161	100	38	156	100

Sumber : Data olahan Kuesioner 2019

Item 1 dari tanggapan responden tentang “Kepala desa mootilango mengkoordinasikan kegiatan bekerja serta pembuatan jadwal pelaksanaan pembangunan”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 9 orang dengan skor 45 memberikan jawaban “Sangat Setuju”, dan sebanyak dan 29 orang dengan skor 116 menjawab “setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala desa mootilango selalu mengkoordinasikan kegiatan bekerja serta pembuatan jadwal pelaksanaan pembangunan, dengan skor total adalah 161 termasuk kategori “sangat tinggi”.

Item 2 dari tanggapan responden tentang “Kepala desa mootilango melibatkan partisipasi bawahan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 5 orang dengan skor 25 memberikan jawaban “Sangat Setuju”, dan sebanyak dan 33 orang dengan skor 132 menjawab “setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala desa mootilango selalu melibatkan partisipasi bawahan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan, dengan skor total adalah 157 termasuk kategori “tinggi”.

Item 3 dari tanggapan responden tentang “Kepala desa mootilango menerima dan memperhatikan masukan dan informasi dari bawahan untuk menyusun tugas kerja”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 9 orang dengan skor 45 memberikan jawaban “Sangat Setuju”, dan sebanyak 29 orang dengan skor 116 menjawab “setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala desa mootilango selalu menerima dan memperhatikan masukan dan informasi dari bawahan untuk menyusun tugas kerja, dengan skor total adalah 161 termasuk kategori “sangat tinggi”.

Item 4 dari tanggapan responden tentang “Jika muncul permasalahan Kepala desa mootilango bersedia membantu dan memberikan jalan keluar dan menjadikan suatu keputusan organisasi”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 6 orang dengan skor 30 memberikan jawaban “Sangat Setuju”, sebanyak 28 orang dengan 116 memberikan jawaban “Setuju”, dan sebanyak 4 orang dengan skor 12 menjawab “kurang setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala desa mootilango sering bersedia membantu dan memberikan jalan keluar dan menjadikan suatu keputusan organisasi, dengan skor total adalah 154 termasuk kategori “tinggi”.

Item 5 dari tanggapan responden tentang “Kepala desa mootilango memberikan arahan berupa penjelasan mengenai bagaimana melaksanakan pekerjaan dengan baik”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 12 orang dengan skor 60 memberikan jawaban “Sangat Setuju”, sebanyak 23 orang dengan 92 memberikan jawaban “Setuju”, dan sebanyak 3 orang dengan skor 9 menjawab “kurang setuju”. Hal ini

menunjukkan bahwa Kepala desa mootilango sering memberikan arahan berupa penjelasan mengenai bagaimana melaksanakan pekerjaan dengan baik, dengan skor total adalah 161 termasuk kategori “sangat tinggi”.

Item 6 dari tanggapan responden tentang “Kepala desa mootilango selalu memberikan motivasi kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 8 orang dengan skor 40 memberikan jawaban “Sangat Setuju”, sebanyak 26 orang dengan 104 memberikan jawaban “Setuju”, dan sebanyak 4 orang dengan skor 12 menjawab “kurang setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala desa mootilango selalu memberikan motivasi kepada bawahan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, dengan skor total adalah 156 termasuk kategori “tinggi”.

4.2.2.3. Analisis Deskriptif Gaya Kepemimpinan Degelatif (X3)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel Gaya Kepemimpinan Delegatif (X3) menurut tinjauan responden berdasarkan tabel 10 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel-10: Nilai (Skor) Gaya Kepemimpinan Delegatif (X3)

Bobot	Item 1			Item 2			Item 3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	5	25	13.2	0	0	0	0	0	0
4	27	108	71.1	0	0	0	0	0	0
3	6	18	15.8	15	45	39.5	3	9	7.9
2	0	0	0	23	46	60.5	24	48	63.2
1	0	0	0	0	0	0	11	11	28.9
Total	38	151	100	38	91	100	38	68	100

2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	38	158	100	38	159	100	38	157	100

Sumber : Data olahan Kuesioner 2019

Item 1 dari tanggapan responden tentang “Kepala desa mootilango memberikan kebebasan kepada para pegawainya dalam mengerjakan tugas yang diberikan”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 5 orang dengan skor 25 memberikan jawaban “Sangat Setuju”, sebanyak dan 27 orang dengan skor 108 menjawab “setuju”, dan sebanyak 6 orang dengan skor 18 menjawab “Kurang Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala desa mootilango sering memberikan kebebasan kepada para pegawainya dalam mengerjakan tugas yang diberikan, dengan skor total adalah 151 termasuk kategori “tinggi”.

Item 2 dari tanggapan responden tentang “Kepala desa mootilango mendelegasikan wewenang setiap pekerjaan/tugas kepada bawahannya”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 15 orang dengan skor 45 memberikan jawaban “Kurang Setuju”, dan sebanyak dan 23 orang dengan skor 46 menjawab “tidak setuju” dengan pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala desa mootilango jarang mendelegasikan wewenang setiap pekerjaan/tugas kepada bawahannya, dengan skor total adalah 91 termasuk kategori “rendah”.

Item 3 dari tanggapan responden tentang “Kepala desa mootilango menyerahkan tanggung jawab dan konsekuensi kepada bawahannya secara penuh”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 3 orang dengan skor 9 memberikan jawaban “Kurang Setuju”, sebanyak 24 orang dengan skor 48 menjawab “Tidak Setuju” dan sebanyak dan 11 orang dengan skor 11

menjawab “Sangat Tidak setuju”. Hal ini menunjukan bahwa Kepala desa mootilango tidak pernah menyerahkan tanggung jawab dan konsekuensi kepada bawahan secara penuh, dengan skor total adalah 68 termasuk kategori “Rendah”.

Item 4 dari tanggapan responden tentang “Kepala desa mootilango menunjukkan perilaku yang bersahabat dalam setiap pengambilan keputusan”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 6 orang dengan skor 30 memberikan jawaban “Sangat Setuju”, dan sebanyak 32 orang dengan 128 memberikan jawaban “Setuju”. Hal ini menunjukan bahwa Kepala desa mootilango selalu menunjukkan perilaku yang bersahabat dalam setiap pengambilan keputusan, dengan skor total adalah 158 termasuk kategori “tinggi”.

Item 5 dari tanggapan responden tentang “Kepala desa mootilango memberikan bimbingan berupa arahan yang jelas dalam setiap penugasan pekerjaan”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 7 orang dengan skor 35 memberikan jawaban “Sangat Setuju”, dan sebanyak 31 orang dengan 124 memberikan jawaban “Setuju”. Hal ini menunjukan bahwa Kepala desa mootilango sering memberikan bimbingan berupa arahan yang jelas dalam setiap penugasan pekerjaan, dengan skor total adalah 159 termasuk kategori “tinggi”.

Item 6 dari tanggapan responden tentang “Kepala desa mootilango membantu pegawai dalam menghadapi setiap permasalahan/pekerjaan”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 5 orang dengan skor 25 memberikan jawaban “Sangat Setuju”, dan sebanyak 33 orang dengan 132 memberikan jawaban “Setuju”. Hal ini menunjukan bahwa Kepala

desa mootilango sering membantu pegawai dalam menghadapi setiap permasalahan/pekerjaan, dengan skor total adalah 157 termasuk kategori “tinggi”.

4.2.2.4. Analisis Deskriptif Pelaksanaan Pembangunan (Y)

Berdasarkan hasil tabulasi data diperoleh nilai masing-masing indikator dari variabel Pelaksanaan Pembangunan (Y) menurut tinjauan responden berdasarkan tabel 11 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel-11: Nilai (Skor) Pelaksanaan Pembangunan (Y)

Bobot	Item 1			Item 2			Item 3		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	3	15	7.9	4	20	10.5	8	40	21.1
4	35	140	92.1	34	136	89.5	30	120	78.9
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	38	155	100	38	156	100	38	160	100

Bobot	Item 4			Item 5			Item 6		
	F	Skor	%	F	Skor	%	F	Skor	%
5	9	45	23.7	5	25	13.2	7	35	18.4
4	29	116	76.3	33	132	86.8	31	124	81.6
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	38	161	100	38	157	100	38	159	100

Sumber : Data olahan Kuesioner 2019

Item 1 dari tanggapan responden tentang “Kepala desa mootilango melibatkan masyarakat dalam musyawarah penyusunan anggaran (APBDes) persiapan pembangunan”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 3 orang dengan skor 15 memberikan jawaban “Sangat Setuju”, sebanyak dan 35 orang dengan skor 140 menjawab “setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala desa mootilango sering melibatkan masyarakat dalam

musyawarah penyusunan anggaran (APBDes) persiapan pembangunan, dengan skor total adalah 155 termasuk kategori “tinggi”.

Item 2 dari tanggapan responden tentang “Kepala desa melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan pembangunan”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 4 orang dengan skor 20 memberikan jawaban “Sangat Setuju”, dan sebanyak dan 34 orang dengan skor 136 menjawab “setuju” dengan pernyataan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala desa mootilango sering melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai pelaksanaan pembangunan, dengan skor total adalah 156 termasuk kategori “tinggi”.

Item 3 dari tanggapan responden tentang “Pelaksanaan pembangunan di desa mootilango selalu melibatkan partisipasi masyarakat”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 8 orang dengan skor 40 memberikan jawaban “Sangat Setuju”, dan sebanyak 30 orang dengan skor 120 menjawab “Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan pembangunan di desa mootilango selalu melibatkan partisipasi masyarakat, dengan skor total adalah 160 termasuk kategori “Sangat Tinggi”.

Item 4 dari tanggapan responden tentang “Kepala desa mootilango selalu melakukan transparansi anggaran pelaksanaan pembangunan”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 9 orang dengan skor 45 memberikan jawaban “Sangat Setuju”, dan sebanyak 29 orang dengan 116 memberikan jawaban “Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa Kepala desa

mootilango selalu melakukan transparansi anggaran pelaksanaan pembangunan, dengan skor total adalah 161 termasuk kategori “sangat tinggi”.

Item 5 dari tanggapan responden tentang “Pelaporan Pelaksanaan pembangunan di desa mootilango selalu dilakukan berdasarkan waktu yang ditentukan”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 5 orang dengan skor 25 memberikan jawaban “Sangat Setuju”, dan sebanyak 33 orang dengan 132 memberikan jawaban “Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa Pelaporan Pelaksanaan pembangunan di desa mootilango sering dilakukan berdasarkan waktu yang ditentukan, dengan skor total adalah 157 termasuk kategori “tinggi”.

Item 6 dari tanggapan responden tentang “Masyarakat dilibatkan dalam evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan di desa mootilango”. Tanggapan responden mengenai indikator ini menunjukkan sebanyak 7 orang dengan skor 35 memberikan jawaban “Sangat Setuju”, dan sebanyak 31 orang dengan 124 memberikan jawaban “Setuju”. Hal ini menunjukkan bahwa Masyarakat desa mootilango dilibatkan dalam evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan, dengan skor total adalah 159 termasuk kategori “tinggi”.

4.2.3. ANALISIS REGRESI BERGANDA

**BERDASARKAN TEMUAN YANG DIPEROLEH PADA SUBJEK,
DATA DIPROSES MENGGUNAKAN SPSS VERSI 23 DAN DIKOMPILASI KE
DALAM TABEL DENGAN VARIABEL YAITU GAYA OTORITER (X2), GAYA
PARTISIPATIF (X2) DAN GAYA DELEGATIF (X3) DAN HASILNYA DAPAT
DILIHAT PADA TABEL 12 DI BAWAH INI :**

TABEL-12 RANGKUMAN HASIL ANALISIS REGRESI BERGANDA

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	21.776	4.787		4.752	.070
Otoriter	.179	.089	.193	1.997	.054
Partisipatif	.365	.169	.262	1.384	.003
Delegatif	.152	.135	.163	1.371	.013

a. Dependent Variable: Pelaksanaan Pembangunan

BERDASARKAN HASIL PERHITUNGAN REGRESI SEPERTI TERLIHAT TABEL-36. TERSEBUT DI ATAS, Maka Dapat DIBUAT PERSAMAAN REGRESI SEBAGAI BERIKUT :

$$Y = 21.776 + 0.193X1 + 0.262X2 + 0.163X3$$

Dari hasil persamaan tersebut di atas menunjukkan bahwa nilai konstanta sebesar 21.776 menyatakan bahwa jika variabel Gaya Otoriter, Gaya Partisipatif dan Gaya Delegatif dianggap konstan, maka pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari ADD di desa Mootilango adalah sebesar 21.776. Sedangkan nilai masing-masing koefisien regresi variabel bebas yang diteliti satuannya akan meningkat, maka pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari ADD di desa Mootilango mengalami peningkatan.

Gaya Otoriter (X1) memiliki koefisien regresi sebesar 0.193 diartikan sebagai meningkat 1 persen Gaya Otoriter, maka pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari ADD (Y) akan meningkat sebesar 0.193 atau 19.3 persen.

Gaya Partisipatif (X2) memiliki Koefisien regresi sebesar 0.262 disepakati untuk tiap penambahan 1 persen Gaya Partisipatif, maka pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari ADD (Y) akan meningkat sebesar 0.262 atau 26.2 persen.

GAYA DELEGATIF (X3) KOEFISEN REGRESINYA SEBESAR 0.163 DITUNJUKAN DENGAN PENINGKATAN 1 PERSEN GAYA DELEGATIF, MAKA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG BERSUMBER DARI ADD (Y) AKAN MENINGKAT SEBESAR 0.163 ATAU 16.3 PERSEN.

4.2.4. ANALISIS KOEFISIEN KORELASI

TABEL 13 : KOEFISIEN KORELASI

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.466 ^a	.534	.257	.189	.134	1.751	3	34	.175

a. Predictors: (Constant), Delegatif, Partisipatif, Otoriter

BERDASARKAN TABEL 13 DI ATAS, TERLIHAT BAHWA ARENA KOEFISIEN KORELASI (R) SAMA DENGAN 0,466, HUBUNGAN ANTARA VARIABEL INDEPENDEN DAN DEPENDEN DAPAT DIKLASIFIKASIKAN SEBAGAI SANGAT KUAT. JUMLAH R SQUARES ADALAH KOEFISIEN DETERMINASI 0,534, MENUNJUKKAN BAHWA 53,4% VARIABEL IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BERSUMBER DARI ADD (Y) DAPAT DIJELASKAN OLEH VARIABEL BEBAS GAYA OTORITER, GAYA

PARTISIPATIF DAN GAYA DELEGATIF, SEDANGKAN SISANYA SEBESAR 0.457 ATAU 45.7% TIDAK SEDANG DITELITI ATAU TIDAK MASUK.

4.2.5. UJI HIPOTESIS

Siginifikasi variabel independen melalui Uji t sebagian atau individual. Metode yang digunakan adalah membandingkan statistik $t_{calculate}$ dengan statistik t_{table} atau menggunakan kriteria keputusan berikut untuk menentukan angka probabilitas (sig.) Dari 0,05 :

- H_0 diterima atau tidak terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Gaya Kepemimpinan terhadap variabel terikat pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari ADD, ditunjukan Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau angka probabilitas (sig.) $> 0,05$;
- H_0 ditolak atau terdapat hubungan yang signifikan antara variabel Gaya Kepemimpinan terhadap variabel terikat pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari ADD, dibuktikan Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ angka probabilitas (sig.) $< 0,05$

ADA PENGARUH POSITIF DAN SIGNIFIKAN ANTARA VARIABEL GAYA OTORITER (X1) TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG BERSUMBER DARI ADD (Y) YANG DITUNJUKAN DENGAN NILAI T HITUNG VARIABEL GAYA OTORITER (X1) SEBESAR 1.997 (1.997 > 1.685) DENGAN TINGKAT SIGNIFIKANSI 0,054 (P < 0,5).

ADA PENGARUH POSITIF DAN SIGNIFIKAN ANTARA VARIABEL GAYA PARTISIPATIF (X2) TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

YANG BERSUMBER DARI ADD (Y) YANG DIBUKTIKAN NILAI T HITUNG VARIABEL GAYA PARTISIPATIF (X2) SEBESAR 1.384 ($1.384 > 1.685$) DENGAN TINGKAT SIGNIFIKANSI 0,003 ($P < 0,5$).

PENGARUH POSITIF DAN SIGNIFIKAN ANTARA VARIABEL GAYA DELEGATIF (X3) TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG BERSUMBER DARI ADD (Y) DIDAPATKAN KARENA ADANYA NILAI T HITUNG VARIABEL GAYA DELEGATIF (X3) SEBESAR 1.371 ($1.371 > 1.685$) DENGAN TINGKAT SIGNIFIKANSI 0,0103 ($P < 0,5$).

PENGUJIAN TERSEBUT DI ATAS MENGGAMBARKAN BAHWA VARIABEL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN YANG BERSUMBER DARI ADD (Y) YANG DOMINAN ADALAH VARIABEL GAYA PARTISIPATIF (X2), HAL INI DIBUKTIKAN DENGAN HASIL NILAI T HITUNG 1.384 YANG TERTINGGI DAN ANGKA SIGNIFIKANSI 0,03 YANG TERKECIL DIANTARA VARIABEL BEBAS LAINNYA.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Kesuksesan maupun kelancaran sebuah pembangunan yang ada didesa dipengaruhi oleh adanya kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan kepala desa yang ditunjang dengan gaya yang sangat mempengaruhi kegiatannya harus dapat dipertahankan. Hasil penelitian dan pengujian data didapatkan bahwa gaya kepemimpinan kepala desa mootilango sangat memberikan pengaruh terhadap

kelancaran pembangunan yang di biayai melalui Alokasi Dana Desa. kepala desa begitu memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan fungsinya sebagai pemimpin. Pembuktian ini ditunjukan dengan gaya partisipatip kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahannya. Banyak tokoh masyarakat menilai bahwa kepala desa telah mampu membawa desa mootilango kearah yang lebih baik. Perilaku yang sering ditunjukan oleh kepala desa dalam kesehariannya mencerminkan keberhasila beliau dalam membangun desa.

Dalam setiap pelaksanaan pembangunan kepala desa turut aktif terlibat setia saat dalam membantu secara langsung dilokasi. Kepala desa rela meninggalkan tempatnya dalam hal ini ruangan kepala desa hanya untuk turut langsung membantu pekerjaan pembangunan, gaya kepemimpinan kepala desa ini terbukti bisa membangkitkan motivasi dan semangat kerja masyarakat dalam mempercepat penyelesaian pekerjaan. Kepala desa tidak pernah sungkan berbaur dengan para tukang masyarakat biasa dengan menunjukan kesamaan derajat dalam bergotong royong membangun desa. berdasarkan temuan penulis dialapangan tidak pernah didapatkan kepala desa menggelembungkan atau menyelewengkan pемbiayaan pembangunan yang bersumber dari ADD, karena kematangan beliau dalam memperhitungkan dan merencanakan pembiayaan pembangunan patut diberikan apresiasi. Semua pembangunan yang dihasilkan di desa mootilango berjalan dengan baik dan memberikan kepuasa kepada masyarakat yang menggunakan hasil dari pembangunan tersebut.

Gara partisipasi kepala desa mootilango menurut argumentasi penulis sangat sulit disamai oleh pemimpin yang ada didesa lain, kepala desa dengan

penampilan sederhananya memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pemimpin tidak selamanya berada dibelakang meja atau berada didalam ruangan. Tetapi pemimpin seseungguhnya adalah pemimpin yang bisa merasakan langsung bagaimana bertindak sebagai masyarakat biasa, tidak pernah sekalipun kepala desa menunjukkan keangkughannya sebagai pemimpin, justru dalam keseharian beliau selalu menghormati tokoh masyarakat yang dianggap telah memberikan kontribusin nyata bagi pengembangan desa. kepala desa dalam pengambilan keputusan selalu melakukan konsultasi dengan tokoh masyarakat dengan tujuan menghasilkan keputusan yang dapat terterima ditengah-tengah masyarakat, sehingga kepala desa merasa nyaman dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa kepala desa mootilango kecamatan duhiadaa kadang-kadang untuk hal-hal tertentu menggunakan gaya demokratis dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam rangka pelaksanaan pembangunan di desa mootilango. Hal ini dapat dibuktikan dari 6 (enam) indikator pernyataan dalam kueisoner yang diisi responden menunjukan Dalam pengambilan keputusan justru kepala desa selalu melibatkan bawahan, selain itu Kepala desa mootilango sering mendengarkan saran bawahan baik aparat kepala dusun maupun tokoh masyarakat terutama dalam proses pelaksanaan pembangunan.

Sedangkan Hasil penelitian untuk variabel Gaya Partisipatif (X2) memiliki nilai Koefisien regresi sebesar 0.262 menyatakan bahwa setiap peningkatan 1 persen Gaya Partisipatif, maka Pelaksanaan Pembangunan (Y) akan meningkat sebesar 0.262 atau 26.2 persen.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kepala desa mootilango kecamatan cenderung menggunakan gaya partisipatif dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat dibuktikan dari 6 (enam) indikator pernyataan dalam kueisoner yang diisi responden seperti Kepala desa mootilango mengkoordinasikan kegiatan pekerjaan serta pembuatan jadwal pelaksanaan pembangunan, koordinasi tersebut dilakukan dengan stakeholder yakni BPD, LPM dan tokoh-tokoh masyarakat. Kepala desa mootilango juga sering melibatkan partisipasi bawahan dalam kegiatan pelaksanaan pembangunan, Kepala desa mootilango menerima dan memperhatikan masukan dan informasi dari bawahan untuk menyusun tugas kerja baik masukan dari aparat desa, lembaga desa maupun dari tokoh-tokoh masyarakat. Begitu pula apabila muncul permasalahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa biasanya Kepala desa mootilango bersedia membantu dan memberikan jalan keluar.

Temuan dilapangan tentang gaya delegatif didapatkan bahwa kepala desa mootilango kecamatan untuk hal-hal tertentu terkadang menggunakan gaya delegatif dalam pelaksanaan pembangunan. Hal ini dapat dibuktikan dari 6 (enam) indikator pernyataan dalam kueisoner yang diisi responden seperti Kepala desa mootilango Kepala desa mootilango menunjukkan perilaku yang bersahabat dalam setiap pengambilan keputusan, Kepala desa mootilango juga memberikan bimbingan berupa arahan yang jelas dalam setiap penugasan pekerjaan serta sering membantu pegawai dalam menghadapi setiap permasalahan/pekerjaan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa Gaya Kepemimpinan Kepala Desa

berpengaruh positif dan signifikasu terhadap pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari ADD di desa mootilango kecamatan duhiadaa. Hasl penelitian tersebut sejalan dengan grand teori yang dikutip oleh penulis bersumber dari bukunya Hasibuan (2007:170) dimana dikatakan bahwa gaya kepemimpinan dibagi menjadi tiga bagian, yaitu Kepemimpinan Otoriter, Kepemimpinan Partisipatif dan Kepemimpinan Delegatif.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan berikut:

1. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Gaya Kepemimpinan Otoriter (X1) terhadap Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari ADD di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, hal ini menunjukkan bahwa variabel Gaya Otoriter (X1) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,193, dan nilai probabilitas sebesar 0,054 yang berarti Gaya Otoriter mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari AD (Y) sebesar 19.3%.
2. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Gaya Kepemimpinan Partisipatif (X2) terhadap Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari ADD di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, hal ini menunjukkan bahwa variabel Gaya Partisipatif (X2) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,262, dan nilai probabilitas sebesar 0,003 yang berarti Gaya Partisipatif mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari AD (Y) sebesar 26.2%.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan variabel Gaya Kepemimpinan Delegatif (X3) terhadap Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari ADD di Desa Mootilango Kecamatan Duhiadaa Kabupaten Pohuwato, hal ini menunjukkan bahwa variabel Gaya Delegatif (X3) memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,163, dan nilai probabilitas sebesar 0,013 yang berarti Gaya

Delegatif mempengaruhi Pelaksanaan Pembangunan yang bersumber dari AD (Y) sebesar 16.3%.

5.2. Saran-Saran

Adapun saran yang dapat dikemukakan penulis sebagai bahan masukan untuk lebih meningkatkan mutu dan manfaat dari penelitian ini :

1. Dari hasil penelitian didapatkan bahwa kepala desa mootilango kecamatan duhiadaa cenderung menggunakan kepemimpinan partisipatif dalam pelaksanaan pembangunan sehingga perlu pendekatan persuasif dan pemberian motivasi yang terus menerus kepada masyarakat terutama berkaitan dengan pelibatan masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa.
2. Pemerintah Desa Mootilango bersama dengan kepala desa dan BPD perlu membuat anggaran realisasi ADD lebih beragam, Hal ini dikarenakan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak hanya berupa pembangunan fisik berupa jalan dan yang lainnya, melainkan juga difokuskan pada pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa Mootilango sebaiknya menyampaikan informasi mengenai kondisi yang sebenarnya dibutuhkan desa kepada Pemerintah Kabupaten. Hal ini bertujuan agar peraturan yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dapat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada di Desa Mootilango.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita R. 2006. Membangun Desa Partisipatif. Yogyakarta [ID]: Graha Ilmu.
- Alfian A. 2009. Menjadi Pemimpin Politik. Jakarta (ID): PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hasibuan HM. 2007. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta (ID): Penerbit
- Mariam R. 2009. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan melalui Kepuasan Kerja Karyawan sebagai Variabel Intervening, Studi Pada Kantor Pusat PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).
- Kartono, Kartini. 1994, *Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu*. Jakarta: Rajawali Press
- Pamudji, S. 1995, *Kepemimpinan Pemerintahan Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Pamudji, S. 1987, *Pembinaan Perkotaan Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rasyid, M. Ryaas. 1997, *Makna Pemerintahan Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan*. Jakarta:P.TYarsifWatampone
- Reksohadiprodjo, Sukanto, Hani Handoko. 1989, *Perusahaan, Teori, Organsasi, Struktur dan Perilaku (edisi2)*. Yogyakarta: BPFEUGM
- Rivai V, Deddy M. 2014. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta (ID): RajawaliPers.
- Siagian,P. Sondang. 1991,*Filsafat Administrasi*. Jakarta:GunungAgung SofiahS.
2015. Pedoman Perencanaan PembangunanDesa. Bogor[ID]. Hal. 1-5 Sugiyono,
- Prof. Dr. 2018, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Thoha,Miftah. Drs. MpA, 2013, *PerspektifPerilaku Birokrasi*. Jakarta:CV. Rajawali
Wahjosumidjo,1984, *KepemimpinanDanMotivasi*. Jakarta:Ghalia Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-UndangNomor23Tahun2014TentangPemerintahanDaerah
Undang-UndangNomor6Tahun2014TentangDesa
Peraturan Pemerintah RI Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-UndangNomor6Tahun2014 TentangDesa
PermendagriRINomor114Tahun2014tentangPedoman Pembangunan Desa.
Permendagri RI Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembangunan Desa.